

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

s/d Triwulan II
Tahun 2023



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS KETENAGAKERJAAN

Kata PENGANTAR

Puji dan syukur kami haturkan ke Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat menjalankan tugas memimpin Dinas Ketenagakerjaan dengan baik dan maksimal. Sebagai ungkapan syukur dan pertanggungjawaban publik, kami telah menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Ketenagakerjaan sampai dengan Triwulan II Tahun 2023. Laporan ini kami buat sebagai pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Dinas Ketenagakerjaan sampai dengan triwulan II Tahun 2023.



Laporan ini disusun secara ringkas untuk memenuhi ketentuan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini menyajikan arah kebijakan Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2023, potret makro ketenagakerjaan, dan capaian kinerja yang telah dilakukan sampai dengan triwulan II Tahun 2023.

Untuk melaksanakan Visi dan Misi Wali Kota Makassar dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, Dinas Ketenagakerjaan terus berupaya meningkatkan perannya melalui perumusan kebijakan, pembinaan sektor ketenagakerjaan dan pelaksanaan kebijakan dan program ketenagakerjaan yang meliputi pengembangan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, peningkatan pelayanan penempatan tenaga kerja, dan penciptaan hubungan industrial yang kondusif.

Kami menyadari, saat ini tantangan dunia ketenagakerjaan sangat berat. Setidaknya kita dikepung oleh 3 (tiga) situasi yang berdampak sangat besar terhadap sektor ketenagakerjaan, yaitu bonus demografi yang melahirkan ledakan jumlah anak-anak muda usia produktif, revolusi industri yang melahirkan disrupsi teknologi, serta dampak pandemi Covid-19 yang berdampak pada meningkatnya angka pengangguran. Menghadapi tantangan yang berat tersebut tidak dapat dilakukan dengan cara-cara yang biasa, kami telah merumuskan berbagai terobosan dan inovasi yang akan diimplementasikan pada Tahun 2024.

Pada akhirnya, laporan ini diharapkan dapat memberi informasi yang memadai tentang pencapaian kinerja Dinas Ketenagakerjaan sampai dengan triwulan II Tahun 2023 sekaligus sebagai bagian dari manifestasi keterbukaan informasi dan tata kelola pemerintahan yang diharapkan berkontribusi positif bagi perbaikan kualitas pembangunan sektor ketenagakerjaan. dalam kerangka pembangunan daerah.

Makassar, 29 Juni 2023

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar



NIELMA PALAMBA, SH. M.AP

Pangkat : Pembina Utama Muda/IV.c

NIP. : 19651210 199112 2 006

Daftar ISI

i	Kata Pengantar
ii	Daftar Isi
iii	Daftar Gambar
iv	Daftar Tabel
1	Bab 1. Pendahuluan
1	1.1. Gambaran Umum Perangkat Daerah
2	1.2. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi
5	1.3. Permasalahan dan Isu Strategis
9	Bab 2. Perencanaan Kinerja
9	2.1. Rencana Strategis
13	2.2. Indikator Kinerja Utama
15	2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
24	Bab 3. Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023
24	3.1. Pengukuran Kinerja Tahun 2023
40	3.2. Akuntabilitas Keuangan
44	Bab 4. Penutup
	Lampiran
	Lampiran 1. Indikator Kinerja Utama (IKU)
	Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
	Lampiran 3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023
	Lampiran 4. Pengukuran Pencapaian Sasaran Tahun 2023
	Lampiran 5. Evaluasi Terhadap Renja Perangkat Daerah
	Lampiran 6. Bukti Dukung Data Capaian Indikator Kinerja Utama

Daftar GAMBAR

4	Gambar 1.1. Bagan Susunan Organisasi
12	Gambar 2.1. Cascading Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan RPJMD Dan Renstra Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2021-2026
26	Gambar 3.1. Perkembangan Jumlah Penduduk yang Bekerja dan Rasio Kesempatan Kerja terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas, 2018-2022
30	Gambar 3.2. Perkembangan Penempatan Tenaga Kerja, 2018-2022
30	Gambar 3.3. Perkembangan Pengembangan Kewirausahaan, 2018-2022
31	Gambar 3.4. Perkembangan Pelatihan dan Sertifikasi, 2018-2022
33	Gambar 3.5. Perkembangan Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja, 2018-2022
35	Gambar 3.6. Perkembangan Kasus Perselisihan Hubungan Industrial, 2018-2022
37	Gambar 3.7. Perkembangan Penyelesaian Kasus Perselisihan HI dan Persentase Penyelesaian dengan Perjanjian Bersama (PB), 2018-2022

Daftar TABEL

11	Tabel 2.1. Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Tahun 2021-2026
14	Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2022-2026
15	Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
24	Tabel 3.1. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2023
28	Tabel 3.2. Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Kota Makassar Tahun 2018 – 2021 (Orang)
33	Tabel 3.3. Produktivitas Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha Kota Makassar Tahun 2018 - 2021 (Juta Rp/Tenaga Kerja)
37	Tabel 3.4. Kriteria Nilai Indikator Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran
38	Tabel 3.5. Hasil Pengolahan Data Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Periode Triwulan II Tahun 2023
40	Tabel 3.6. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
41	Tabel 3.7. Tingkat Efisiensi Anggaran Dikaitkan dengan Kinerja Tahun 2023
42	Tabel 3.8. Realisasi Keuangan Dinas Ketenagakerjaan TA. 2023

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Dalam Undang-Undang 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tertuang bahwa pada kurun waktu 2005 – 2025 pembangunan Bidang Ketenagakerjaan melalui kebijakan pasar kerja diarahkan untuk mendorong terciptanya lapangan kerja formal yang luas serta meningkatkan kesejahteraan pekerja informal. Selain itu, diharapkan pula terciptanya pasar kerja fleksibel yang ditandai dengan; produktivitas pekerja yang tinggi, pengelolaan pelatihan tenaga kerja bagi program pelatihan strategis, kompetensi pekerja yang sesuai dengan dinamika kebutuhan industry dan persaingan global, hubungan industrial yang harmonis dengan perlindungan yang layak, keselamatan kerja yang memadai, serta terwujudnya proses penyelesaian perselisihan industrial yang memuaskan semua pihak.

Kebijakan pasar kerja diarahkan untuk mendorong terciptanya sebanyak mungkin lapangan kerja formal serta meningkatkan kesejahteraan pekerja di sektor-sektor pekerja informal. Pasar kerja yang fleksibel, hubungan industrial yang harmonis dengan perlindungan yang layak, keselamatan kerja yang memadai, serta terwujudnya proses penyelesaian masalah industrial yang memuaskan semua pihak merupakan ciri pasar kerja yang diinginkan. Selain itu, pekerja diharapkan mempunyai produktivitas yang tinggi sehingga dapat bersaing serta menghasilkan nilai tambah yang tinggi pula. Hal tersebut dilakukan dengan pengelolaan pelatihan dan pemberian dukungan bagi program-program pelatihan yang strategis untuk efektivitas dan efisiensi peningkatan kualitas tenaga kerja sebagai bagian integral dari investasi sumber daya manusia.

Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar merupakan bagian dari Pemerintah Kota Makassar dengan tugas dan tanggung jawab dalam hal pelayanan umum ketenagakerjaan yang meliputi perencanaan, perluasan dan penempatan, pelatihan peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, pembinaan hubungan industrial dan syarat-syarat kerja serta pengawasan dan perlindungan ketenagakerjaan. Mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar sebagai instansi pemerintah dan unsur penyelenggara negara diwajibkan menetapkan target kinerja dan melakukan pengukuran kinerja yang telah dicapai serta menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP).

Penyusunan LKJIP Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2023 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kerja Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja pada tahun mendatang. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu, substansi penyusunan LKJIP didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja pada masing-masing unit satuan kerja yang ada di lingkungan Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar

1.2. Tugas Pokok, Fungsi Dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah membawa konsekuensi pada perubahan paradigma pemerintahan yang juga berimplikasi pada mekanisme perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Implikasi tersebut antara lain penyerahan sebagian besar kewenangan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah termasuk kewenangan dibidang Ketenagakerjaan yang menjadi urusan wajib dalam pemerintahan dan pembangunan daerah.

Kebijakan tersebut berimplikasi pada pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar. Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut secara struktural mengacu kepada kebijakan Pemerintah Kota Makassar, namun secara fungsional tetap terkoordinasi dengan kebijakan Nasional Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan serta Instansi/Lembaga terkait lainnya.

Fungsi koordinatif ini dimaksudkan agar program penanganan permasalahan ketenagakerjaan di Kota Makassar tetap sejalan dengan program dan kebijakan secara nasional dalam lintas daerah, mengingat penanganan permasalahan ketenagakerjaan tidak mengenal batas wilayah.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Makassar No. 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja;
2. Pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja;

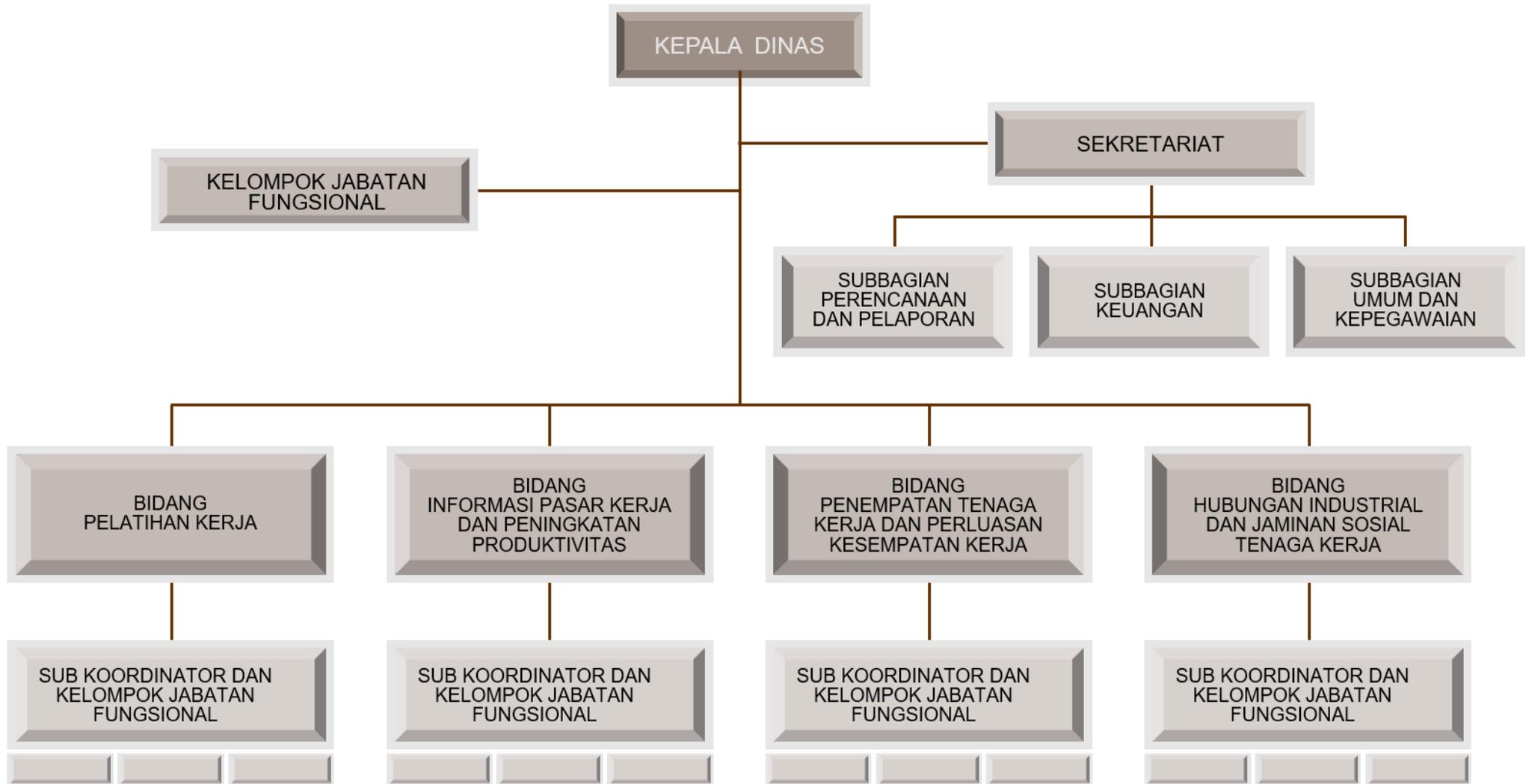
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja;
4. Pelaksanaan administrasi dinas Urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja;
5. Pembinaan, pengkoordinasian, pengelolaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan bidang Ketenagakerjaan, dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud meliputi:

1. merencanakan program kerja Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
3. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna tertib administrasi perkantoran;
5. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. merumuskan kebijakan perencanaan tenaga kerja, Peningkatan Produktivitas, pelatihan kerja, penempatan tenaga kerja dan hubungan industrial;
7. melaksanakan dan mengoordinasikan kebijakan perencanaan tenaga kerja, Peningkatan Produktivitas, pelatihan kerja, penempatan tenaga kerja dan hubungan industrial;
8. melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan perencanaan tenaga kerja, Peningkatan Produktivitas, pelatihan kerja, penempatan tenaga kerja dan hubungan industrial;
9. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan tenaga kerja, Peningkatan Produktivitas, pelatihan kerja, penempatan tenaga kerja dan hubungan industrial;
10. melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai dengan bidang tugasnya;
11. mengoordinasikan pelaksanaan administrasi umum, kepegawaian, barang milik Daerah, perencanaan dan pelaporan kinerja serta pengelolaan keuangan Dinas;
12. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
13. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
15. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Untuk menjalankan fungsi dan tugas tersebut, bagan struktur organisasi Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar sebagaimana bagan berikut:

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI



1.3. Permasalahan Dan Isu Strategis

Dalam perkembangannya, kondisi ketenagakerjaan sampai saat ini tetap menunjukkan suatu permasalahan yang kompleks dan akan selalu berkembang seiring pertumbuhan sosial, politik, ekonomi, keamanan serta kebijakan Pemerintah.

Dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar menghadapi berbagai permasalahan yang harus diatasi agar tidak merugikan dan isu-isu strategis yang harus diantisipasi pada saat sekarang agar mendukung kinerja organisasi.

A. Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan ketenagakerjaan di Makassar pada Tahun 2023 antara lain:

1. Adanya pandemi covid-19 yang berimbas pada ditutupnya banyak tempat-tempat usaha.

Dengan adanya pandemi Covid-19, tidak hanya masalah kesehatan yang timbul, namun semua aspek dalam kehidupan ikut terdampak termasuk perekonomian. Perekonomian mulai menurun sejak diberlakukannya pembatasan aktivitas. Penurunan tersebut juga berdampak pada dinamika ketenagakerjaan di Makassar. Tidak hanya pengangguran, penduduk usia kerja lainnya juga turut terdampak dengan adanya pandemi Covid-19. Para penganggur ini semakin sulit mendapatkan pekerjaan. Apalagi mereka akan bersaing dengan pengangguran baru, dikarenakan jumlah pengangguran ini dapat dipastikan akan bertambah, mengingat adanya pandemi covid-19 telah menyebabkan mereka yang tadinya memiliki pekerjaan menjadi kehilangan pekerjaan.

2. Permasalahan banyaknya kesempatan kerja yang tidak dapat diisi akibat ketidaksesuaian kompetensi

Persoalan pengangguran dipicu tiadanya kesesuaian antara jenjang pendidikan dan ketersediaan lapangan kerja. Kondisi ini memicu tenaga kerja terdidik, justru mengambil lahan pekerjaan kelompok tidak terampil. Fenomena ini imbas dari kegagalan lulusan pendidikan tinggi, khususnya para sarjana, yang juga menganggur dan akhirnya mengambil jatah lulusan SMA.

3. Pertumbuhan angkatan kerja lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan lapangan kerja baru

Fenomena lapangan kerja yang tidak sesuai antara kebutuhan pencari kerja dengan pengusaha sebagai pemberi kerja disinyalir muncul akibat ketimpangan informasi, terutama di kalangan anak muda yang baru lulus sekolah yang mengandalkan informasi dari hasil obrolan dengan teman atau keluarga.

4. Keterampilan tenaga kerja rendah

Pemerintah wajib memediasi institusi pendidikan dan pengusaha. Dalam hal ini, wajib ada pelatihan di luar bursa kerja untuk menambah keterampilan generasi muda yang baru lulus sekolah.

5. Tingginya kesenjangan sosial dan ekonomi

Masyarakat miskin tidak hanya dari kalangan pengangguran atau pendidikan rendah. Hasil kajian LIPI menyebutkan, sekitar 43,67 persen pekerja Indonesia saat ini masih berada di bawah garis kemiskinan. Ini terjadi lantaran kecilnya upah dan tingginya harga barang.

6. Lemah dan belum kondusifnya iklim investasi dalam menghadapi pasar global

Secara umum iklim investasi di Kota Makassar dipengaruhi oleh faktor-faktor non ekonomi, seperti kestabilan politik, penegakan hukum, pertanahan, kriminalitas, aksi buruh dan mahasiswa, komitmen pemerintah, layanan perbankan, dukungan infrastruktur dan layanan birokrasi pemerintah.

Penerapan kebijakan di bidang ketenagakerjaan yang tidak transparan telah mengakibatkan kondisi ketenagakerjaan menjadi kurang produktif, tenaga kerja yang tidak terampil, etos kerja yang lemah, kenaikan upah minimum yang terlalu cepat, dan maraknya demo dan pemogokan serta kasus-kasus perburuhan yang membuat investor melakukan relokasi usahanya ke beberapa negara tetangga yang lebih kondusif.

B. Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis berupa peluang dan ancaman yang harus diantisipasi dalam pembangunan ketenagakerjaan di Makassar antara lain:

1. Terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia

Memang tingkat pertumbuhan ekonomi di Makassar akhir-akhir ini mengalami kemajuan. Namun kenyataannya, yang terjadi adalah pasar kerja tetap saja tidak mampu menyerap angkatan kerja yang ada dan para penganggur yang telah ada.

Kesempatan kerja masih terbatas disebabkan karena jumlah angkatan kerja masih lebih besar dari peluang kerja atau kesempatan kerja yang tersedia. Terbatasnya kesempatan kerja baru serta tidak adanya link and match antara kompetensi yang dimiliki tenaga kerja dengan pasar kerja menjadi salah satu penyebab masalah masih tingginya tingkat pengangguran usia muda di Indonesia.

Untuk mengatasi terbatasnya kesempatan atau peluang kerja ini dapat dilakukan dengan cara memprioritaskan penciptaan lapangan pekerjaan baik formal maupun informal yang dipadukan dengan program aksi pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas seperti pengembangan industri padat karya yang mampu menyerap tenaga kerja yang besar, memperbanyak kesempatan kerja

melalui wirausaha yang dapat dilakukan oleh semua lulusan jenjang pendidikan mulai dari SD sampai lulusan universitas/ perguruan tinggi.

2. Rendahnya kualitas tenaga kerja baik dari segi pendidikan formal maupun keterampilan

Kualitas tenaga kerja dalam suatu daerah dapat ditentukan dengan melihat tingkat pendidikan daerah tersebut. Sebagian besar tenaga kerja di Makassar, tingkat pendidikannya masih rendah. Hal ini menyebabkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi rendah. Minimnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan rendahnya produktivitas tenaga kerja, sehingga hal ini akan berpengaruh terhadap rendahnya kualitas hasil produksi barang dan jasa

Kecakapan seorang tenaga kerja pastinya berpengaruh pada daya jualnya di pasar tenaga kerja serta dalam produktifitasnya ketika menghasilkan barang dan jasa.

Dengan adanya tenaga kerja yang berkualitas rendah, maka pengangguran akan semakin berkembang hebat. Karena dunia kerja hanya menyerap tenaga kerja yang mempunyai kualitas dan kemampuan yang tinggi. Sedangkan mereka yang berkualitas rendah akan langsung disingkirkan. Atau paling tidak jika seorang tenaga kerja hanya mempunyai kualitas rendah, dia akan menjadi tenaga kerja yang menangani pekerjaan kasar dan berat

3. Tingginya angka kasus perselisihan hubungan industrial

Hubungan industrial adalah sistem hubungan yang terbentuk antara pelaku di dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Saat ini hubungan industrial masih memiliki kendala, diantaranya kondisi hubungan kerja yang harmonis belum sepenuhnya tercapai dan belum optimalnya peran, fungsi dan jumlah sarana-sarana hubungan industrial yang sesungguhnya dapat dijadikan sebagai jembatan untuk mencapai tujuan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan seperti : Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit, LKS Tripartit, Peran Serikat Pekerja (SP)/Serikat Buruh (SB) serta Asosiasi Pengusaha.

Selain hal tersebut, kondisi hubungan industrial juga masih dihadapkan pada persoalan pengupahan. Penetapan Upah Minimum Kota sebagai jaring pengaman di dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai harapan. Disamping pengupahan, agenda yang menjadi tuntutan pekerja/buruh adalah terkait dengan penghapusan outsourcing.

Perselisihan hubungan industrial adakalanya sulit dihindari, bahkan diikuti dengan mogok kerja yang pada akhirnya menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal tersebut menunjukkan bahwa hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha masih cenderung melihat hubungan kerja

berdasarkan “hak”, sehingga prinsip-prinsip musyawarah untuk mufakat sulit tumbuh dan berkembang di perusahaan.

BAB 2 PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja, yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Rencana kerja (RENJA) Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan yang memuat rencana program/kegiatan beserta rincian target kinerja capaian program yang akan di capai pada tahun 2023. Penyusunan Rencana Kerja tahun 2023 disusun berpedoman pada Peraturan Walikota nomor 85 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar tahun 2023 dan Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 55 tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

2.1. Rencana Strategis

Untuk adanya kesatuan pandang dalam rangka melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan bidang ketenagakerjaan dirumuskan tujuan dan sasaran sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Ketenagakerjaan dengan menjaga prinsip sinkronisasi dan konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan dengan mengacu pada strategi pembangunan daerah Kota Makassar sebagaimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 Kota Makassar.

Dalam upaya mewujudkan Visi Kota Makassar Tahun 2022-2026 **“Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia yang Sombere dan Smart City dengan Imunitas Kuat untuk Semua”**, dengan 3 (tiga) misi Kota Makassar yaitu sebagai berikut :

1. Revolusi Sumber Daya Manusia (SDM) dan percepatan reformasi birokrasi menuju SDM Kota yang unggul dengan pelayanan publik kelas dunia bersih dari indikasi korupsi;
2. Rekonstruksi Kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya menuju masyarakat sejahtera dengan imunitas ekonomi, sosial, budaya dan kesehatan kota yang kuat untuk semua;
3. Restorasi ruang kota yang inklusif menuju kota nyaman kelas dunia yang “Sombere’ dan Smart City” untuk semua.

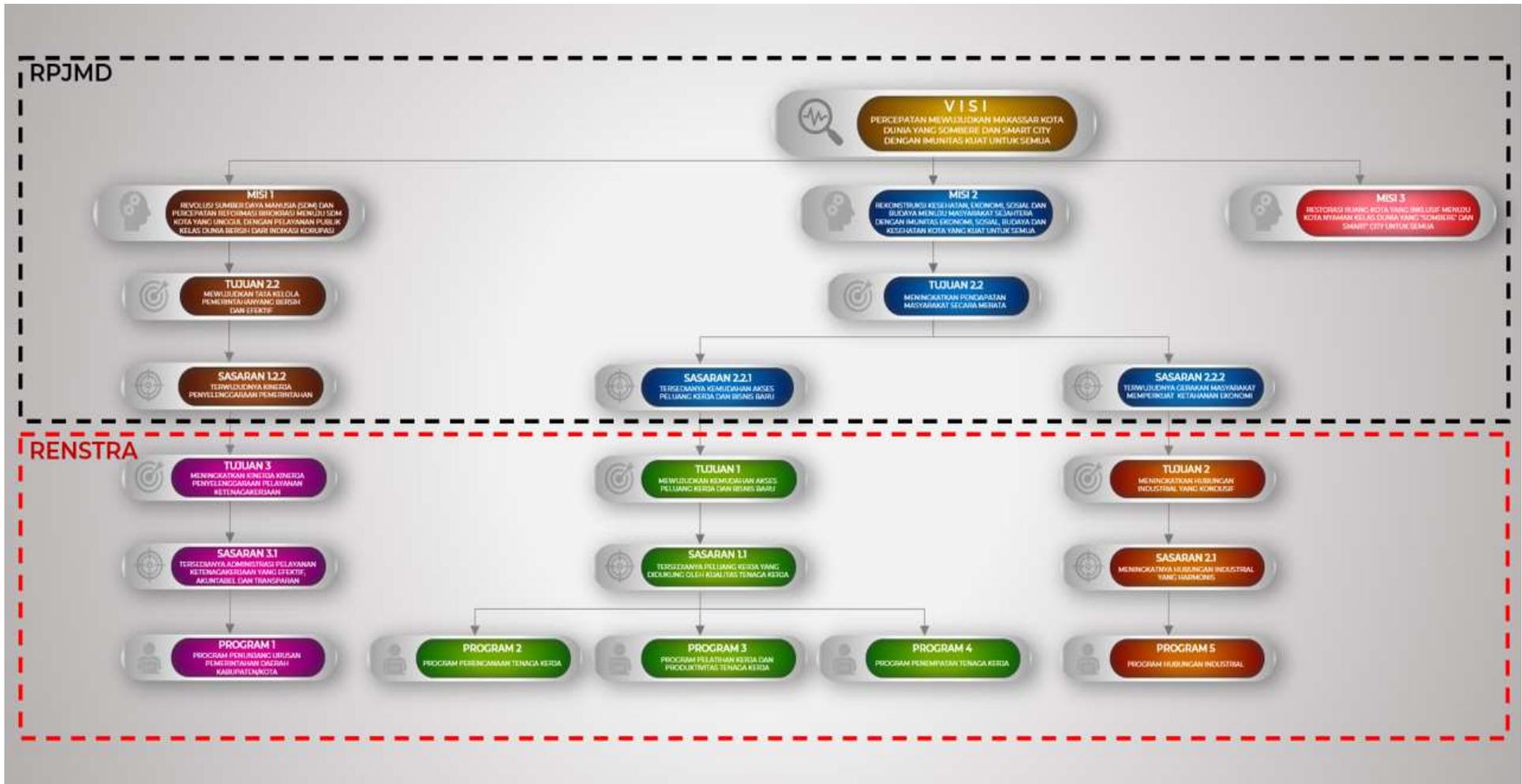
Dalam implementasi seluruh jenis pelayanan dan tugas Dinas Ketenagakerjaan dimana untuk non urusan sesuai dengan misi pertama (1) “Revolusi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Percepatan Reformasi Birokrasi Menuju SDM Kota yang Unggul dengan Pelayanan Publik Kelas Dunia Bersih dari Indikasi Korupsi”, pada tujuan 1.2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif pada sasaran 1.2.2 Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah. Sedangkan untuk urusan tenaga kerja sesuai dengan misi kedua (2) Kota Makassar “Rekonstruksi Kesehatan, Ekonomi, Sosial dan Budaya Menuju Masyarakat Sejahtera dengan Imunitas Ekonomi, Sosial, Budaya dan Kesehatan Kota yang Kuat Untuk Semua”, pada tujuan 2.2. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Secara Merata pada sasaran 2.2.1. Tersedianya Kemudahan Akses Peluang Kerja dan Bisnis Baru serta pada sasaran 2.2.2. Terwujudnya Gerakan Masyarakat Memperkuat Ketahanan Ekonomi.

Dari pedoman di atas serta untuk mengatasi berbagai permasalahan dan mengantisipasi isu-isu strategis berupa ancaman dan peluang dalam pembangunan ketenagakerjaan, Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar telah menetapkan tujuan, sasaran strategis, langkah-langkah strategis dan kebijakan sebagaimana dituang dalam dokumen Rencana Strategis tahun 2021-2026. Adapun strategi, kebijakan, sasaran strategis dan indikator kinerja tahun 2021-2026 sebagaimana tertuang pada table 2.1 dan keterkaitan antar dokumen perencanaan tertuang pada bagan 2.1 berikut:

Tabel 2.1. Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Tahun 2021-2026

Isu Strategi	Strategi dan Kebijakan	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program Pendukung
Terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan sistem jejaring informasi lowongan kerja untuk mengoptimalkan penyerapan tenaga kerja di pasar kerja; • Memberikan pelayanan administrasi yang optimal bagi pencari kerja AK.1 s/d AK.5; dan • Pembudayaan kewirausahaan, pembinaan padat karya produktif dan pengenalan teknologi tepat guna (TTG) untuk mengoptimalkan perluasan kesempatan kerja di sektor informal 	Mewujudkan Kemudahan Akses Peluang Kerja dan Bisnis Baru	Tersedianya Peluang Kerja yang Didukung oleh Kualitas Tenaga Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas; dan 2. Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Perencanaan Tenaga Kerja; 2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga kerja; serta 3. Program Penempatan Tenaga Kerja
Masih rendahnya kualitas tenaga kerja baik dari segi pendidikan formal maupun keterampilan	<ul style="list-style-type: none"> • Mengoptimalkan pelatihan kerja dengan mengacu kepada kebutuhan pasar kerja; • Sinergi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam penghantaran kompetensi spesifik sesuai tuntutan pasar; dan • Pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga pelatihan kerja (LPK) 				
Tingginya angka kasus perselisihan hubungan industrial	<ul style="list-style-type: none"> • Mewujudkan rasa ketenangan bekerja dan berusaha sehingga tercipta hubungan yang serasi antara pekerja dan pengusaha; • Melaksanakan mediasi guna memberikan solusi penyelesaian perselisihan HI yang menguntungkan kedua belah pihak namun tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada; • Melaksanakan penyuluhan dan pemyarakatan pendidikan hubungan industrial di perusahaan; dan • Perbaiki syarat-syarat kerja dan sistem pengupahan 	Meningkatkan Hubungan Industrial yang Kondusif	Terciptanya Hubungan Industrial yang Harmonis	Angka Sengketa Perusahaan-Pekerja Pertahun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Hubungan Industrial

Gambar 2.1. Bagan Cascading Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Rpjmd Dan Renstra Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2021-2026



2.2. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Nomor: 4132/DISNAKER/560/XII/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2022-2026 yang mengatur Indikator Kinerja Utama merupakan acuan yang digunakan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, dalam menetapkan perencanaan tahunan, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, melakukan pengukuran kinerja, menyusun laporan kinerja dan melaksanakan pengendalian dan evaluasi kinerja, sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2021-2026 yang disusun dengan mengacu pada Peraturan Walikota Makassar Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2022-2026.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2022-2026 sebagaimana tertuang pada tabel berikut :

Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2022-2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data	Keterangan/Rumus Perhitungan
1	Tersedianya Peluang Kerja yang Didukung oleh Kualitas Tenaga Kerja	Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas	Hasil Sakernas Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia	$RKJ = \frac{\sum \text{penduduk yang bekerja}}{\sum \text{penduduk Angkatan kerja}} \times 100\%$
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Hasil Sakernas Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia	$RPTK = \frac{PDRB}{\sum \text{penduduk yang bekerja}} \times 100\%$
2	Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis	Angka Sengketa Perusahaan-Pekerja Pertahun	Hasil Laporan Kasus Perselisihan Hubungan Industrial dan Laporan Wajib Lapo Ketenagakerjaan	$\text{Angka Sengketa} = \frac{\sum \text{kasus perselisihan HI yang dilaporkan}}{\sum \text{perusahaan}} \times 100\%$
3	Tersedianya Administasi Pelayanan Ketenagakerjaan yang Efektif, Akuntabel, dan Transparan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Laporan Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
		Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketenagakerjaan	Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketenagakerjaan oleh Inpektorat Kota Makassar

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Berdasarkan APBD yang telah disepakati oleh DPRD, maka dalam waktu satu bulan SKPD diwajibkan menyusun dokumen Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja berisikan penugasan dari Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan Perangkat Daerah sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar menyusun Perjanjian Kinerja tahun 2023 berdasarkan hasil pembahasan dengan seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar. Target capaian kinerja tahun 2023 Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar sebagai berikut :

Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Tersedianya Peluang Kerja yang Didukung oleh Kualitas Tenaga Kerja	Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas	52,00%
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	21,50%
2	Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis	Angka Sengketa Perusahaan - Pekerja	4,14%
3	Tersedianya Administasi Pelayanan Ketenagakerjaan yang Efektif, Akuntabel, dan Transparan	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,00%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	80,00%

Dalam Perjanjian Kinerja Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2023 untuk pembangunan bidang ketenagakerjaan direncanakan dalam 5 program dan membutuhkan dana sebesar Rp.18.274.048.000,- (delapan belas milyar dua ratus tujuh puluh empat juta empat puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian anggaran sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota direncanakan melaksanakan 8 (delapan) kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) subkegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp.10.656.347.320,- (sepuluh milyar enam ratus lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh rupiah);

2. Program Perencanaan Tenaga Kerja

Program Perencanaan Tenaga Kerja direncanakan melaksanakan 1 (satu) kegiatan dan 2 (satu) subkegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp.155.408.000,- (seratus lima puluh lima juta empat ratus delapan ribu rupiah);

3. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja.

Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja direncanakan melaksanakan 5 (lima) kegiatan dan 6 (enam) subkegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp.4.256.251.500,- (empat milyar dua ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah);

4. Program Penempatan Tenaga Kerja.

Program Penempatan Tenaga Kerja direncanakan melaksanakan 4 (empat) kegiatan dan 13 (tiga belas) subkegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp.2.212.970.380,- (dua milyar dua ratus dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah); dan

5. Program Hubungan Industrial.

Program Hubungan Industrial direncanakan melaksanakan 2 (dua) kegiatan dan 8 (delapan) subkegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp.993.070.800,- (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh puluh ribu delapan ratus rupiah).

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel Rencana Aksi Kinerja Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2023 berikut :

TABEL 2.1
RENCANA AKSI KINERJA
DINAS KETENAGAKERJAAN TAHUN 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	TARGET KINERJA				PROGRAM/KEGIATN/ SUBKEGIATAN	ANGGARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	TARGET PROGRAM/KEGIATAN				PENANGGUNG JAWAB
				I	II	III	IV					I	II	III	IV	
1	Tersedianya Peluang Kerja yang Didukung oleh Kualitas Tenaga Kerja	Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas	52,00 Persen	0,00	0,00	0,00	52,00	2.07.02 Program Perencanaan Tenaga Kerja	155.408.000	Persentase Kegiatan yang Dilaksanakan yang Mengacu ke RTK	93,55 Persen	93,33%	93,33%	93,33%	93,55	Bidang Perencanaan Tenaga Kerja dan Peningkatan Produktivitas
								2.07.02.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	155.408.000	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK)	1 Dokumen	0	0	0	1	Bidang Perencanaan Tenaga Kerja dan Peningkatan Produktivitas
	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	21,50 Persen	0,00	0,00	0,00	21,50	2.07.02.01.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	88.666.000	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	0	0	0	1	Bidang Perencanaan Tenaga Kerja dan Peningkatan Produktivitas	
							2.07.02.01.02 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	66.742.000	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	50 Orang	0	50	0	0	Bidang Perencanaan Tenaga Kerja dan Peningkatan Produktivitas	
							2.07.03 Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	4.256.251.500	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	0,7 Persen	0,53	0,60	0,65	0,70	Bidang Perencanaan Tenaga Kerja dan Peningkatan Produktivitas serta Bidang Pelatihan Kerja	
									Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja	21,5 Persen	20,69	21,20	21,20	21,50		
									Jumlah Peserta Pelatihan Skill Training Gratis Sektor Ketenagakerjaan	1.000 Orang	250	250	250	250		
							2.07.03.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	2.556.527.500	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi	560 Orang	100	100	220	144	Bidang Pelatihan Kerja	
							2.07.03.01.01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	2.520.312.000	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun 2023	564 Orang	100	100	220	144	Bidang Pelatihan Kerja	
							2.07.03.01.02 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	36.215.500	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun 2023	50 Lembaga	50	0	0	0	Bidang Pelatihan Kerja	
2.07.03.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	132.796.000	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	60 Lembaga	0	60	0	0	Bidang Pelatihan Kerja								
2.07.03.02.01 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	132.796.000	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	60 Lembaga		60			Bidang Pelatihan Kerja								

2.07.03.03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	192.600.400	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	24 Perizinan	6	6	6	6	Bidang Pelatihan Kerja
2.07.03.03.01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	192.600.400	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	24 Perizinan	6	6	6	6	Bidang Pelatihan Kerja
03.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	541.556.000	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	320 Perusahaan	80	80	160	0	Bidang Perencanaan Tenaga Kerja dan Peningkatan Produktivitas
03.04.01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	541.556.000	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	320 Perusahaan	80	80	160	0	Bidang Perencanaan Tenaga Kerja dan Peningkatan Produktivitas
03.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	832.771.600	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	2 Dokumen	0	1	0	1	Bidang Perencanaan Tenaga Kerja dan Peningkatan Produktivitas
03.05.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	832.771.600	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	2 Dokumen	0	1	0	1	Bidang Perencanaan Tenaga Kerja dan Peningkatan Produktivitas
2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	2.212.970.380	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota Makassar	60,00 Persen	30,00	40,00	50,00	60,00	Bidang Penempatan Tenaga Kerja
			Jumlah Peluang Kerja Dan Peluang Bisnis Baru	8.640 Peluang Kerja	2160	2160	2160	2160	
2.07.04.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/ Kota	1.591.348.680	Jumlah Tenaga kerja yang Ditempatkan, Diberdayakan dan Fasilitasi Layanan	3.909 Orang	500	1000	1409	1000	Bidang Penempatan Tenaga Kerja
2.07.04.01.01	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	30.011.000	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	30 Orang	0	30	0	0	Bidang Penempatan Tenaga Kerja
2.07.04.01.02	Pelayanan antar Kerja	96.077.500	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	3500 Orang	875	875	875	875	Bidang Penempatan Tenaga Kerja
2.07.04.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	25.269.000	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	100 Orang	0	100	0	0	Bidang Penempatan Tenaga Kerja
2.07.04.01.04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	69.828.200	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	100 Orang	0	100	0	0	Bidang Penempatan Tenaga Kerja
2.07.04.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	1.370.162.980	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	209 Orang	0	40	169	0	Bidang Penempatan Tenaga Kerja

										2.07.04.02	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	70.038.600	Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi	6 Lembaga	1	1	2	2	Bidang Penempatan Tenaga Kerja
										2.07.04.02.01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	42.453.600	Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi	6 Lembaga	1	1	2	2	Bidang Penempatan Tenaga Kerja
										2.07.04.02.02	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	27.585.000	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	4 Lembaga	1	1	1	1	Bidang Penempatan Tenaga Kerja
										2.07.04.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	453.906.200	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar	4000 Orang	1000	1000	1000	1000	Bidang Penempatan Tenaga Kerja
										2.07.04.03.01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	42.767.600	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	12 Dokumen	3	3	3	3	Bidang Penempatan Tenaga Kerja
										2.07.04.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	46.109.600	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	4000 Orang	1000	1000	1000	1000	Bidang Penempatan Tenaga Kerja
										2.07.04.03.03	Job Fair/Bursa Kerja	365.029.000	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	1000 Orang	0	0	1000	0	Bidang Penempatan Tenaga Kerja
										2.07.04.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota	97.676.900	Jumlah PMI yang Mendapatkan Perlindungan dan Pemberdayaan	120 Orang	0	100	20	0	Bidang Penempatan Tenaga Kerja
										2.07.04.04.01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) / Pekerja Migran Indonesia (PMI)	25.310.000	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	100 Orang	0	100	0	0	Bidang Penempatan Tenaga Kerja
										2.07.04.04.03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	72.366.900	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	20 Orang	0	0	20	0	Bidang Penempatan Tenaga Kerja
2	Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis	Angka Sengketa Perusahaan-Pekerja	4,14	Persen	4,67	4,4	4,2	4,14	2.07.05	Program Hubungan Industrial	741.251.300	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak	33,69 Persen	30,75	31,50	32,00	33,69	Bidang Hubungan Industrial	
												Angka Sengketa Perusahaan-Pekerja	4,14 Persen	4,67	4,40	4,20	4,14		
												Persentase Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (Pb)	74,00 Persen	40,00	50,00	60,00	74,00		
										2.07.05.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	50.622.100	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama	105 Perusahaan	26	26	27	26	Bidang Hubungan Industrial

						2.07.05.01.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	1.708.000	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	100 Perusahaan	25	25	25	25	Bidang Hubungan Industrial
						2.07.05.01.02	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	1.280.000	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	5 Perusahaan	1	1	2	1	Bidang Hubungan Industrial
						2.07.05.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	47.634.100	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	12 Laporan	3	3	3	3	Bidang Hubungan Industrial
						2.07.05.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	690.629.200	Jumlah Pelaksanaan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	260 Perkara	60	70	70	60	Bidang Hubungan Industrial
						2.07.05.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	104.582.000	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	60 Perkara	10	20	20	10	Bidang Hubungan Industrial
						2.07.05.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	174.318.400	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	200 Perkara	50	50	50	50	Bidang Hubungan Industrial
						2.07.05.02.03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	16.766.000	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	12 Asosiasi dan Serikat Pekerja	3	3	3	3	Bidang Hubungan Industrial
						2.07.05.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	300.630.800	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	2 Lembaga	3	3	3		Bidang Hubungan Industrial
						2.07.05.02.05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	346.151.500	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	100 Orang			150		Bidang Hubungan Industrial

3	Tersedianya administrasi pelayanan ketenagakerjaan yang efektif, akuntabel, dan transparan	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,00	Persen	0	86,00	86,00	87,00	2.07.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	251.276.000	Persentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	90	Persen	68,00	70,0	80,0	90,00	Sekretariat	
		Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	80,00	Persen	0	0	80,00					Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan Dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	100	Persen	25,00	25,00	25,00	25,00		
												Persentase Asn Perangkat Daerah Yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	90,00	Persen	68,25	70,00	80,00	90,00		
										2.07.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	248.640.000	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13	Dokumen	1	1	5	6	Sekretariat
										2.07.01.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	133.736.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	0	0	1	1	Sekretariat
										2.07.01.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.176.000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	0	0	1	0	Sekretariat
										2.07.01.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.176.000	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	0	0	1	0	Sekretariat
										2.07.01.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.636.000	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	0	0	0	1	Sekretariat
										2.07.01.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.724.000	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	0	0	0	1	Sekretariat
										2.07.01.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	106.000.000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	Dokumen	1	1	2	1	Sekretariat
										2.07.01.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	192.000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Dokumen	0	0	0	2	Sekretariat
										2.07.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.275.828.906	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	36	Dokumen	9	9	9	9	Sekretariat
										2.07.01.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.891.108.906	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	61	Orang/ Bulan	61	0	0	0	Sekretariat
										2.07.01.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	240.720.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	3	3	3	3	Sekretariat
								2.07.01.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	144.000.000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	3	3	3	3	Sekretariat		

2.07.01.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	-	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	- Laporan	0	0	0	0	0	Sekretariat
2.07.01.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	143.673.200	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi BMD pada Perangkat Daerah	12 Dokumen	3	3	3	3	3	Sekretariat
2.07.01.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	83.440.800	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik	12 Dokumen	3	3	3	3	3	Sekretariat
2.07.01.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	60.232.400	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	3	3	3	3	3	Sekretariat
2.07.01.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	224.138.400	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Dokumen	3	3	3	3	3	Sekretariat
2.07.01.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	88.650.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	110 Paket	110	0	0	0	0	Sekretariat
2.07.01.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	60.488.400	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi	12 Dokumen	3	3	3	3	3	Sekretariat
2.07.01.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	75.000.000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	2	3	5	0	0	Sekretariat
2.07.01.05.10	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-	- Orang	0	0	0	0	0	Sekretariat
2.07.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.013.832.780	Jumlah Jenis Jasa Adminitrasi Umum yang Tersedia	7 Jenis	1	2	3	1	1	Sekretariat
2.07.01.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.687.100	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0	1	0	0	0	Sekretariat
2.07.01.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	78.695.300	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	2	3	0	0	0	Sekretariat
2.07.01.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	77.430.380	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	3 Paket	1	2	0	0	0	Sekretariat
2.07.01.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	39.620.000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	0	1	1	0	0	Sekretariat
2.07.01.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19.500.000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3	3	3	3	3	Sekretariat
2.07.01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	331.500.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32 Laporan	8	8	8	8	8	Sekretariat
2.07.01.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	454.400.000	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada	12 Dokumen	3	3	3	3	3	Sekretariat
2.07.01.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	274.199.750	Jumlah Unit Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	56 Unit	19	37	0	0	0	Sekretariat

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pengukuran Kinerja Tahun 2023

Dalam Perjanjian Kinerja Dinas Ketenagakerjaan tahun 2023 tertuang 3 (tiga) sasaran dan 5 (lima) indikator kinerja dengan alokasi anggaran belanja daerah sebesar Rp. Rp.18.274.048.000,- (delapan belas milyar dua ratus tujuh puluh empat juta empat puluh delapan ribu rupiah) yang dijabarkan dalam 5 (lima) program, 20 (dua puluh) kegiatan dan 60 (enam puluh) subkegiatan. Kinerja tahun 2023 merupakan kinerja tahun kedua Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2021-2026. Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2023 adalah sebesar 92,23 persen yang dihitung dari rata-rata capaian dari seluruh sasaran kinerja. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1. Capaian Kinerja Tahun 2023

Sasaran Strategis 1					
Tersedianya Peluang Kerja yang Didukung oleh Kualitas Tenaga Kerja					
No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	Persen	52,00	52,26	100,51
2	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Persen	21,50	20,69	96,25
Sasaran Strategis 2					
Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis					
1	Angka Sengketa Perusahaan-Pekerja Pertahun	Persen	4,14	4,67	87,20
Sasaran Strategis 3					
Tersedianya Administasi Pelayanan Ketenagakerjaan yang Efektif, Akuntabel, dan Transparan					
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	87,00	78,64	90,39
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	Persen	80,00	70,80	88,50

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 5 Indikator Kinerja yang diperjanjikan oleh Dinas Ketenagakerjaan pada tahun 2023, 1 indikator memiliki realisasi kinerja lebih dari 100 persen, 2 indikator memiliki realisasi kinerja lebih dari 90 persen dan 2 indikator memiliki realisasi kinerja lebih dari 80 persen.

Adapun analisis capaian kinerja sasaran pada tabel di atas sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1					
Tersedianya Peluang Kerja yang Didukung oleh Kualitas Tenaga Kerja					
No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Existing Tahun 2021	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	51,67	52,00	52,26	100,51
2	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	20,05	21,50	20,69	96,25

Capaian target kinerja sasaran pertama (1) diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja utama adalah sebesar 98,38 persen atau kategori sangat tinggi dengan penjelasan atas capaian masing-masing indikator kinerja utama di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas

Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas (penduduk usia kerja) adalah perbandingan kesempatan kerja penduduk terhadap total penduduk usia kerja (penduduk usia 15 tahun ke atas). Pendekatan yang digunakan untuk menghitung kesempatan kerja adalah jumlah penduduk yang bekerja (supply side) dengan asumsi bahwa jumlah penduduk yang bekerja sama dengan jumlah kesempatan kerja yang tersedia. kelebihan dari sisi supply side dikurangi dengan demand side (pengangguran).

Metode perhitungan yang digunakan untuk memonitor rasio kesempatan kerja tersebut di atas adalah sebagai berikut:

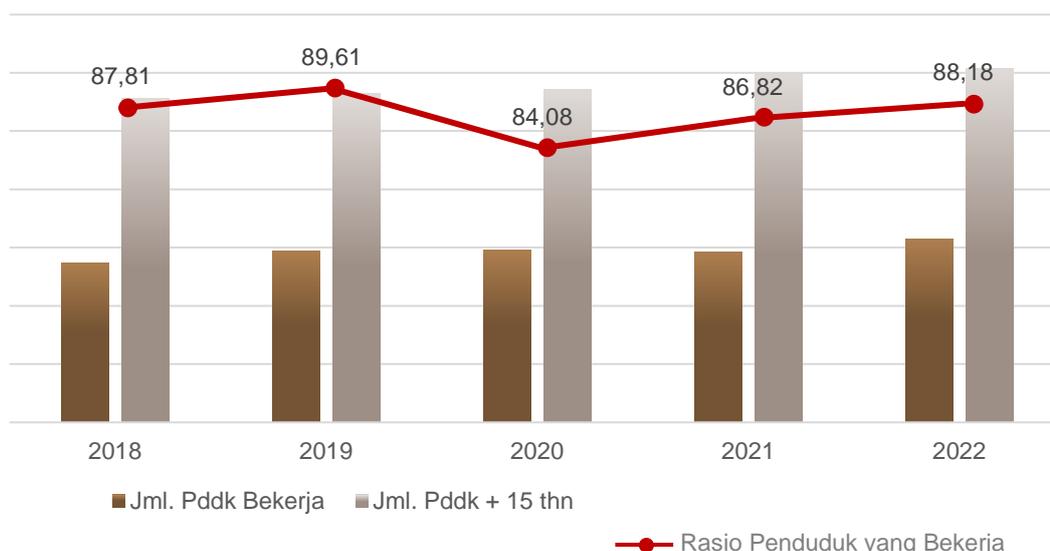
$$RKJ = \frac{\sum \text{penduduk yang bekerja}}{\sum \text{penduduk Angkatan kerja}} \times 100\%$$

Penciptaan kesempatan kerja merupakan instrumen yang sangat penting dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan ketenagakerjaan. Keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan sangat ditentukan oleh ketersediaan kesempatan kerja dalam jumlah dan kualitas yang memadai. Jadi, penciptaan kesempatan kerja harus dijadikan strategi pokok dalam

pembangunan. Dengan demikian perbaikan ekonomi dapat dirasakan manfaatnya secara riil oleh masyarakat, berupa tumbuhnya kesempatan kerja yang luas, berkualitas, dan produktif.

Penciptaan kesempatan kerja pada hakikatnya menjadi tanggung jawab dari berbagai pihak, meliputi pemerintah, dunia usaha, dunia pendidikan, dan masyarakat. Penciptaan kesempatan kerja merupakan salah satu hak dasar yang dijamin Undang-Undang Dasar 1945. Penciptaan kesempatan kerja juga memiliki peran yang strategis dalam pengentasan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat, sesuai dengan upaya pencapaian konsep SDGs (Sustainable Development Goals).

Pada Tahun 2023 Dinas Ketenagakerjaan menargetkan Rasio Kesempatan Kerja terhadap Penduduk Usia 15 tahun ke atas sebesar 52,00 persen. Dari target yang ditetapkan, capaian pada triwulan I tahun 2023 sebesar 52,26 persen dimana sebanyak 643.368 jiwa penduduk yang bekerja dari 1.230.996 jiwa penduduk usia kerja di Kota Makassar. Angka tersebut merupakan data hasil Sakernas tahun 2022, untuk data tahun 2023 belum tersedia disebabkan Sensus Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) yang dilaksanakan pada bulan Agustus setiap tahunnya oleh BPS RI.



Gambar 3.1. Perkembangan Jumlah Penduduk yang Bekerja dan Rasio Kesempatan Kerja terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas, 2018-2022

Penduduk yang Bekerja (PYB) adalah penduduk yang melakukan kegiatan ekonomi dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pola kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi. PYB merupakan salah satu bagian dari angkatan kerja yang menggambarkan

informasi mengenai jumlah pekerja yang terdapat pada angkatan kerja, baik formal maupun informal.

Kondisi PYB kota Makassar selama periode tahun 2018 - 2022 cenderung mengalami penambahan namun fluktuatif. Pada tahun 2018, jumlah PYB sebanyak 589.221 orang dan mengalami penambahan menjadi sebanyak 643.368 orang pada tahun 2022 atau bertambah sebanyak 54.147 orang. Sementara, kondisi di tahun 2020, jumlah PYB mengalami penurunan sebanyak minus 7.192 orang. Penurunan tersebut cukup besar yang terjadi akibat pandemi Covid-19 yang memberikan dampak besar terhadap ketenagakerjaan.

Melihat potensi yang dimiliki kota Makassar, terdapat 3 lapangan usaha unggulan yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi, diantaranya (1) Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, (2) Industri pengolahan, dan (3) Konstruksi. Ketiga lapangan usaha tersebut juga mempunyai peranan penting terhadap jumlah penyerapan tenaga kerja selama periode tahun 2018 - 2022. Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor merupakan lapangan usaha dengan jumlah terbanyak dalam penyerapan tenaga kerja yaitu mencapai sebanyak 177.588 orang (28,48 persen) di tahun 2018. Meskipun menjadi lapangan usaha andalan, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor mengalami penurunan dari sisi jumlah hingga tahun 2021. Penurunan tersebut sebanyak minus 17.525 orang sehingga pada tahun 2021 jumlah penyerapan tenaga kerja di lapangan usaha ini menjadi sebesar 160.063 orang (27,18 persen). Seperti diketahui, kota Makassar menjadi salah satu kota niaga terkemuka di dunia. Di kota ini pula terdapat salah satu pelabuhan yang dijadikan sebagai pusat perdagangan maritim di kawasan timur Indonesia yang letaknya di bagian barat kota Makassar tepat berada di bibir pantai jalur selat Makassar. Besarnya aktivitas perdagangan mempunyai peran besar terhadap penyerapan tenaga kerja. Selain itu, ditandai juga dengan banyaknya perusahaan-perusahaan yang berdiri di kota Makassar.

Penyerapan tenaga kerja terbanyak kedua yaitu terdapat pada lapangan usaha industri pengolahan. Pada tahun 2018, lapangan usaha ini mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 68.010 orang (10,91 persen). Jika melihat kondisi penyerapan tenaga kerja sebelum pandemi, lapangan usaha ini mengalami penurunan PYB dan saat pandemi melanda juga tetap menurun. Imbas wabah Covid-19 ini menyebabkan sejumlah perusahaan terpaksa merumahkan bahkan memutuskan hubungan kerja. Banyaknya masyarakat kota Makassar yang terimbas akibat dampak pandemi sehingga penyerapan tenaga kerja di lapangan usaha ini cukup besar mengalami penurunan. Kondisi kembali membaik seiring pandemi Covid-19 yang cenderung melandai. Terlihat pada tahun 2021 yang mengalami penambahan penyerapan tenaga kerja cukup banyak. Pada tahun 2021, penyerapan tenaga kerja di lapangan usaha industri pengolahan menjadi sebanyak 58.489 orang

(9,28 persen). Berbagai program Pemerintah dalam rangka mengatasi dampak krisis ekonomi telah dilakukan untuk mendukung pemulihan perekonomian kota Makassar. Secara bertahap perusahaan-perusahaan dapat bangkit ditandai mulai beroperasi normal kembali dan perusahaan mulai aktif dalam melakukan penerimaan tenaga kerja. Sehingga selama rentang waktu hingga tahun 2021, jumlah tenaga kerja yang terserap berfluktuatif namun cenderung mengalami penurunan. Selama periode tahun 2018 - 2021 di lapangan usaha industri pengolahan mengalami penurunan PYB sebanyak 9.521 orang.

Lapangan usaha selanjutnya yang menyerap tenaga kerja terbanyak adalah konstruksi. Pola yang terjadi di lapangan usaha ini relatif sama seperti industri pengolahan yaitu berfluktuatif. Meskipun berfluktuatif, tetapi penyerapan tenaga kerja di lapangan usaha ini mampu meningkat selama periode tahun 2018-2021. Pada tahun 2018, lapangan usaha ini mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 60.524 orang (9,71 persen), dan pada tahun 2021 menjadi sebanyak 63.299 orang (10,05 persen), sehingga mengalami penambahan sebanyak 2.775 orang. Dampak pandemi Covid-19 yang begitu besar juga terjadi di lapangan usaha konstruksi. Banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan di lapangan usaha ini. Namun begitu ekonomi mulai pulih, konstruksi kota Makassar bisa bangkit dari sisi penyerapan tenaga kerjanya. Fenomena ini tentu perlu dukungan pemerintah kota Makassar dalam menentukan langkah strategis sehingga lapangan usaha konstruksi serta lapangan usaha lain dapat terus menyerap tenaga kerja yang tumbuh meningkat dengan menyiapkan persediaan tenaga kerja yang memiliki kompetensi dan kualitas tinggi yang link and match dengan kebutuhan DUDIKA.

Penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha Kota Makassar tahun 2018-2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2. Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Kota Makassar Tahun 2018 – 2021 (Orang)

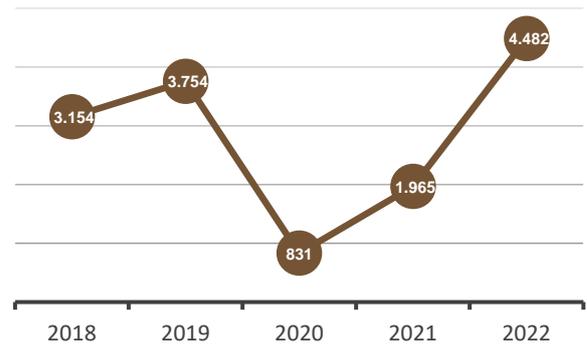
Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021
1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	19.421	6.714	17.591	18.695
2. Pertambangan dan Penggalian	922	487	3.449	2.782
3. Industri Pengolahan	68.010	58.470	50.990	58.489
4. Pengadaan Listrik dan Gas	1.789	7.019	4.446	780
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3.209	6.154	3.886	8.163
6. Konstruksi	60.524	47.017	44.013	63.299
7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	177.588	168.402	159.111	160.063

8. Transportasi dan Pergudangan	53.338	62.889	58.160	53.305
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	49.165	47.809	46.004	61.446
10. Informasi dan Komunikasi	6.591	12.259	7.205	10.485
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	20.672	18.729	16.230	16.944
12. Real Estate	5.463	5.398	3.963	2.741
13. Jasa Perusahaan	16.140	15.826	23.018	22.817
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	43.630	61.699	45.627	53.732
15. Jasa Pendidikan	39.863	44.856	45.470	48.990
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	13.795	16.562	12.876	16.924
17. Jasa Lainnya	43.513	47.603	43.286	30.278
Jumlah	623.633	627.893	585.325	629.933

Adapun upaya dalam pencapaian target sasaran tersebut, Dinas Ketenagakerjaan telah beberapa kali menggelar kegiatan yang bertujuan meningkatkan serapan penempatan seperti job fair yang telah banyak bekerja sama dengan instansi atau perusahaan di Kota Makassar, pengembangan jejaring informasi pasar kerja, pembentukan bursa Kerja khusus (BKK) yang merupakan sebuah lembaga yang dibentuk di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Swasta dan Universitas, sebagai unit pelaksana yang memberikan pelayanan dan informasi lowongan kerja, pelaksana pemasaran, penyaluran dan penempatan tenaga kerja, merupakan mitra Dinas Ketenagakerjaan. BKK merupakan wadah dalam mempertemukan alumni dengan pencari kerja, sebagai wadah dalam memberikan pelatihan tamatan sesuai dengan permintaan pasar kerja.

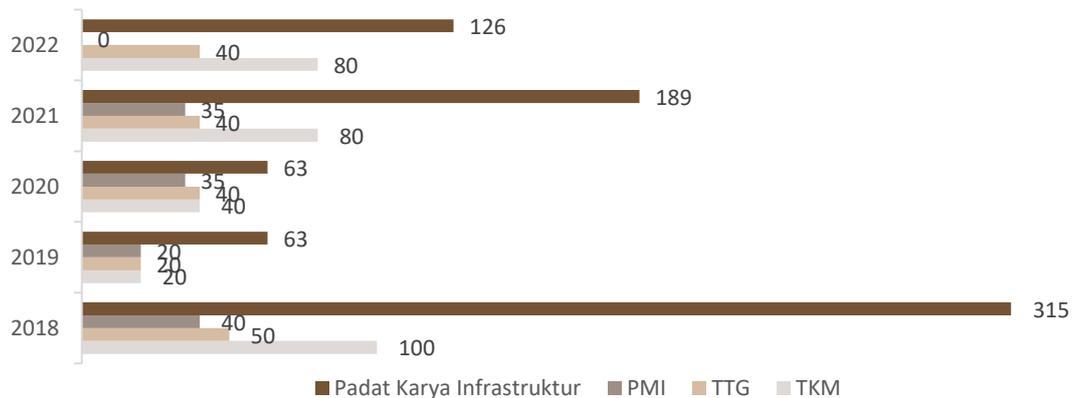


Beberapa upaya lain yang dilakukan melalui pelayanan antar kerja, dorongan-dorongan (penyuluhan) untuk giat bekerja melalui bimbingan teknis memperbaiki kejiwaan, mental dan moralitas para pengangguran untuk melakukan hal yang berguna dan berdampak positif serta pelayanan Informasi Pasar Kerja Online. Selain itu Dinas Ketenagakerjaan juga melakukan pembinaan kepada Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS).



Gambar 3.2. Perkembangan Penempatan Tenaga Kerja, 2018-2022

Mengembangkan program kewirausahaan yang efektif untuk membentuk wirausaha dalam rangka memperluas kesempatan kerja yang terukur dan berkelanjutan melalui pelatihan wirausaha dan kegiatan padat karya berupa Pembinaan Kelompok Usaha Mandiri, Padat Karya Produktif Teknologi Tepat Guna dan Padat Karya Infrastruktur.

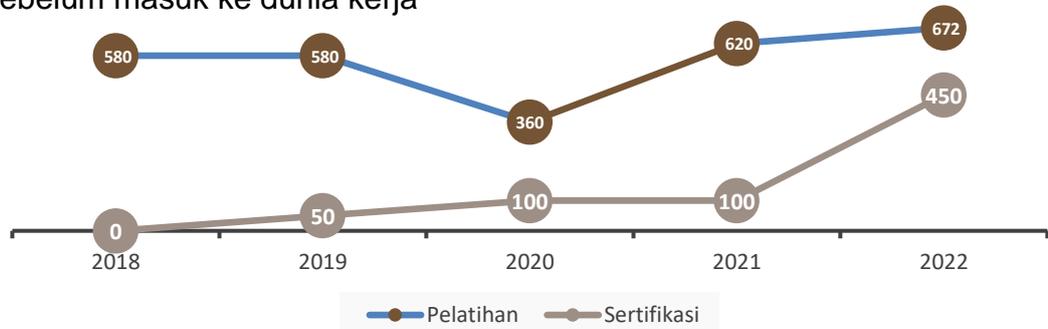


Gambar 3.3. Perkembangan Pengembangan Kewirausahaan, 2018-2022

Menyiapkan tenaga kerja yang berkualitas dan kompeten sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan mencetak wirausaha baru yang berdaya saing sehingga dapat mendorong pembentukan tenaga kerja yang memiliki karakter, mampu dalam mengantisipasi perubahan teknologi dan persyaratan kerja serta untuk mengisi lapangan kerja didalam maupun luar negeri melalui pelatihan kerja berbasis kompetensi, sertifikasi, pemagangan dan peningkatan produktivitas tenaga kerja.

Adanya Program Strategis Wali Kota “10.000 Skill Training Gratis” dengan memberikan pelatihan kerja berbasis kompetensi dan pengembangan produktivitas. Pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan perusahaan serta dunia

usaha. Akan semakin dipertajam dengan mengirim tenaga magang keluar negeri dan pelatihan bahasa asing. Peserta magang akan melalui proses tes kelayakan di Jakarta, baik tes kompetensi, produktivitas, keterampilan, kesehatan dan penguasaan bahasa asing. Pelatihan dan Sertifikasi ini diharapkan menjadi salah satu upaya mendorong daya saing tenaga kerja lokal sebelum masuk ke dunia kerja



Gambar 3.4. Perkembangan Pelatihan dan Sertifikasi, 2018-2022

Melakukan pemantauan akreditasi lembaga pelatihan kerja (LPK) serta kurikulum pelatihan senantiasa dikembangkan dan disempurnakan agar lebih mengikuti perkembangan IPTEK dan kebutuhan pasar kerja.

Pencapaian kinerja di atas juga didorong oleh terbentuknya Forum Skill Development Center (SDC) yang merupakan kerjasama antara Pemerintah Kota Makassar dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dimana Forum SDC bertujuan untuk mengurangi pengangguran dengan memberikan bekal pelatihan kepada tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja. Selain itu juga menjaring perusahaan industri untuk terlibat secara langsung dalam hal penempatan tenaga kerja. Selain itu adanya kerjasama dengan Asean Development Bank (ADB) terkait Job Start dengan memberikan pelatihan hard dan soft skill ke pada pencari kerja.



Pencapaian kinerja peningkatan kesempatan kerja juga ditunjang oleh terbentuknya forum Human Resources Development (HRD) dari sejumlah perusahaan swasta yang berada di Kota Makassar.

Dalam pencapaian kinerja di atas di dukung oleh 3 program yaitu :

1. Program Perencanaan Tenaga Kerja
Program Perencanaan Tenaga Kerja terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 2 (satu) subkegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp.318.554.000,- (tiga ratus delapan belas juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah).
2. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja terdiri dari 5 (lima) kegiatan dan 6 (enam) subkegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp.4.244.883.880,- (empat milyar dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).
3. Program Penempatan Tenaga Kerja
Program Penempatan Tenaga Kerja terdiri dari 4 (empat) kegiatan dan 12 (dua belas) subkegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp.3.386.889.550,- (tiga milyar tiga ratus delapan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah).

2. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja

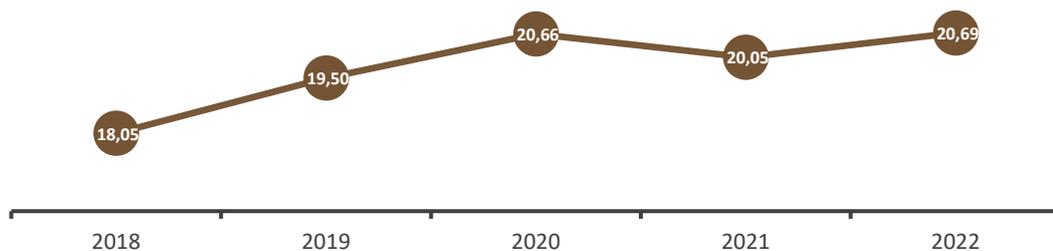
Produktivitas kerja adalah ukuran perbandingan kualitas dan kuantitas dari seorang tenaga kerja dalam satuan waktu untuk mencapai hasil atau prestasi kerja secara efektif dan efisien dengan sumber daya yang digunakan.

Metode perhitungan yang digunakan untuk memonitor tingkat produktivitas tenaga kerja tersebut di atas adalah sebagai berikut:

$$\text{TPTK} = \frac{\text{PDRB (harga konstan) (Miliar Rupiah)}}{\sum \text{penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja}} \times 100\%$$

Pada Tahun 2023 Dinas Ketenagakerjaan menargetkan Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja sebesar 21,50 persen. Dari target yang ditetapkan, capaian pada tahun 2023 sebesar 20,69 persen atau dengan tingkat capaian sebesar 96,25 persen. Dimana PDRB dengan harga konstan sebesar Rp. 133.132,60 (dalam milyar rupiah) dari 643.368 jiwa tenaga kerja.

Selama periode tahun 2018 - 2022, tingkat produktivitas tenaga kerja di kota Makassar mengalami peningkatan meskipun berfluktuatif. Pada tahun 2018, produktivitas sebesar 18,05 persen kemudian mengalami peningkatan menjadi sebesar 20,69 persen pada tahun 2022, atau mengalami peningkatan sebesar 2,64 persen.



Gambar 3.5. Perkembangan Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja, 2017-2021

Produktivitas dipandang sebagai salah satu indikator penting dalam aktivitas ekonomi. Sebagai indikator penting dalam aktivitas ekonomi, produktivitas digunakan sebagai alat ukur untuk mengukur faktor produksi yang menjadi alat ukur kinerja suatu daerah. Produktivitas tinggi akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi tinggi pula yang mana menjadi salah satu sasaran utama kebijakan pemerintah. Selain itu, produktivitas tenaga kerja berkaitan dengan kesejahteraan tenaga kerja. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dapat meningkatkan pendapatan sehingga kesejahteraan bisa tercapai. Peningkatan produktivitas menjadi unsur penting menuju perekonomian yang lebih kompetitif dan sejahtera. Produktivitas tenaga kerja menggambarkan output yang dihasilkan oleh setiap tenaga kerja pada tahun tertentu. Semakin tinggi produktivitasnya menandakan tenaga kerja semakin produktif. Dalam subbab ini akan dibahas mengenai produktivitas kota Makassar menurut lapangan usaha.

Kota Makassar merupakan salah satu kota yang mengalami peningkatan produktivitas di saat pandemi Covid-19 melanda. Jika melihat per sektor, pada tahun 2018, sektor informasi dan komunikasi menjadi sektor dengan produktivitas tertinggi dibandingkan sektor lainnya yakni sebesar Rp 2.083,96 juta/tenaga kerja. Sektor Informasi dan komunikasi ini merupakan salah satu sektor andalan yang memberikan kontribusi besar terhadap pembentukan PDRB kota Makassar. Sektor informasi dan komunikasi ini juga merupakan salah satu sektor yang menjadi tulang punggung dalam menghadapi pandemic Covid-19, hal ini didorong oleh keberlangsungan kegiatan produktif pekerja di kala pandemi melanda.

Produktivitas tenaga kerja menurut lapangan usaha Kota Makassar tahun 2018 - 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.3. Produktivitas Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha Kota Makassar Tahun 2018 - 2021 (Juta Rp/Tenaga Kerja)

Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021
1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	25,99	78,34	28,93	27,72
2. Pertambangan dan Penggalian	0,71	1,18	-	-
3. Industri Pengolahan	306,67	388,71	426,91	387,75
4. Pengadaan Listrik dan Gas	27,59	7,68	11,59	69,23
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	71,24	36,53	60,73	29,97
6. Konstruksi	303,97	426,11	459,70	333,36

7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	126,61	149,30	149,44	156,94
8. Transportasi dan Pergudangan	51,32	47,63	42,57	49,55
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	54,56	59,61	49,67	49,55
10. Informasi dan Komunikasi	2.083,96	1.216,77	2.288,29	1.671,45
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	297,63	339,93	399,43	370,80
12. Real Estate	667,93	710,52	968,67	1.440,78
13. Jasa Perusahaan	74,68	85,61	52,16	55,52
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	80,24	61,12	82,29	72,91
15. Jasa Pendidikan	261,76	247,91	248,58	238,73
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	217,56	198,38	285,83	233,55
17. Jasa Lainnya	67,75	68,49	65,21	100,36
Produktivitas	180,50	195,04	206,56	200,52

Sasaran Strategis 2					
Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis					
No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Existing Tahun 2022	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Pertahun	4,21	4,14	0,73	182,40

Keterangan :

* = Realisasi masih menggunakan hasil pengukuran tahun 2022

Capaian target kinerja sasaran kedua (2) yang diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja utama adalah sebesar 182,40% atau kategori sangat tinggi.

Dari target 4,14 persen angka sengketa pengusaha-pekerja pertahun terealisasi sebesar 0,73 persen atau dengan capaian sebesar 182,40 persen. Dimana dari 7.550 jumlah perusahaan sebanyak 55 kasus hubungan industrial yang tercatat.

Perlu diketahui indikator ini bermakna negatif, artinya jika semakin besar realisasi berarti semakin buruk kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin baik kinerjanya. Selain itu dari 55 jumlah kasus yang tercatat merupakan kumulatif dari bulan Januari sampai dengan Maret tahun 2023.

Metode perhitungan yang digunakan untuk memonitor Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Pertahun tersebut di atas adalah sebagai berikut:

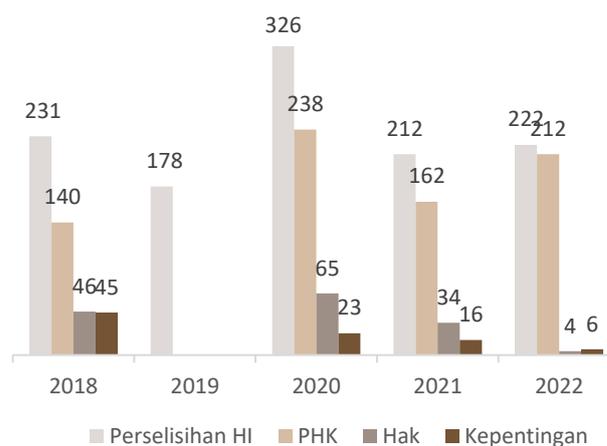
$$\text{Angka Sengketa} = \frac{\sum \text{kasus perselisihan HI yang dilaporkan}}{\sum \text{perusahaan di Kota Makassar}} \times$$

Hubungan industrial yang harmonis mendorong terciptanya ketenangan berusaha dan bekerja, peningkatan produksi dan produktivitas kerja serta keterampilan tenaga kerja. Hubungan industrial yang baik akan mempermudah setiap pihak mencapai tujuannya. Peningkatan hubungan industrial juga berdampak pada perkembangan perusahaan yang akan mendorong penciptaan lapangan kerja baru. Yang tentunya ini akan membantu pemerintah dalam mengatasi pengangguran. Hubungan industrial yang kondusif akan mendorong terciptanya stabilitas di sektor kerja dan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Pada keadaan tertentu kepentingan di antara keduanya dapat berbeda, hal ini berpotensi menimbulkan konflik yang berujung pada perselisihan hubungan industrial. Oleh karena itu, sarana sarana hubungan industrial sangat diperlukan agar tercipta iklim kerja yang harmonis.

Dinas Ketenagakerjaan dalam mewujudkan hubungan industrial melakukan pembinaan antara lain Serikat Pekerja/Serikat Buruh, organisasi pengusaha, lembaga kerjasama bipartit, lembaga kerjasama tripartite dan peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan.

Selain itu melakukan pendaftaran dan pemantauan Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Dalam menjamin kesejahteraan pekerja melakukan pembinaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan penetapan Upah Minimum Kota (UMK) melalui Dewan Pengupahan. Hubungan antara pekerja dan pengusaha yang secara tertulis dituangkan dalam perjanjian kerja tidak selamanya berjalan mulus. Ada kalanya salah satu atau kedua belah pihak melalaikan kewajibannya dan atau tidak memenuhi haknya. Dengan tidak dipenuhinya hak atau kewajiban tersebut, dapat menimbulkan perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan pengusaha. Semua perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit yakni hanya antara kedua belah pihak. Apabila perundingan bipartit gagal maka salah satu atau kedua belah pihak yang sedang berselisih mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan setempat dengan ditawarkan kepada pihak yang berselisih untuk menyelesaikan alternatif penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi, konsiliasi atau arbitrase. Apabila para pihak tersebut



Gambar 3.6. Perkembangan Perselisihan Hubungan Industrial, 2018-2022

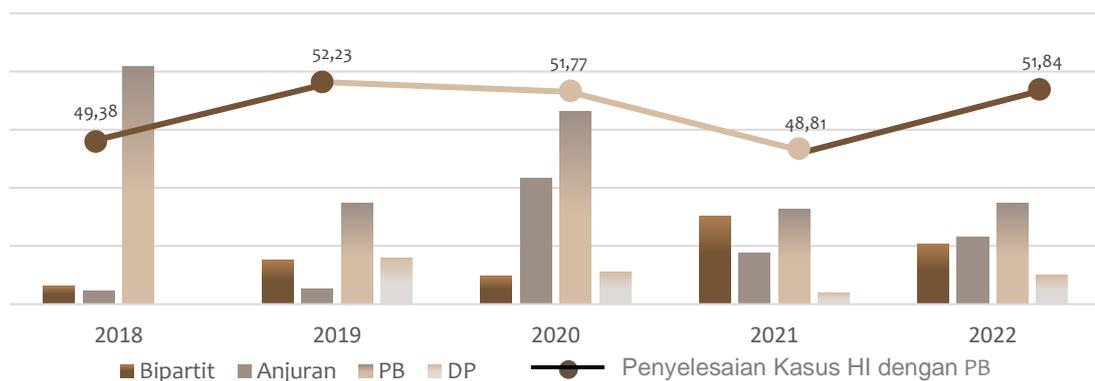


memutuskan untuk memilih alternatif mediasi maka penyelesaian perselisihan tersebut dilimpahkan kepada mediator Dinas Ketenagakerjaan dan untuk segera dilaksanakan mediasi. Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan tersebut, maka

permasalahan yang dibahas adalah bagaimana Peran Dinas Ketenagakerjaan sebagai mediator dalam penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Dinas Ketenagakerjaan sebagai mediator dalam penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Kota Makassar.

Kasus sengketa pengusaha-pekerja pada tahun 2022 sebanyak 222 meningkat sebanyak 10 kasus dimana pada tahun 2021 tercatat sebanyak 212 kasus. Akan tetapi menurun dibandingkan pada tahun 2020 dimana tercatat kasus sengketa pengusaha-pekerja sebanyak sebanyak 326 kasus. Hal ini dikarenakan banyaknya tenaga kerja yang terdampak Pandemi Covid-19. Dampak Pandemi Covid-19 banyak tenaga kerja mengalami pemutusan hubungan kerja.

Dari 2022 kasus perselisihan hubungan industrial sebanyak 212 kasus PHK, 4 kasus perselisihan hak dan 6 perselisihan kepentingan. Sedangkan dalam hal penyelesaian kasus sebanyak 52 kasus diselesaikan secara bipartite, 58 secara anjuran, 87 secara perjanjian bersama dan 25 kasus masih dalam proses mediasi.



Gambar 3.7. Perkembangan Penyelesaian Kasus Perselisihan HI dan Persentase Penyelesaian dengan Perjanjian Bersama (PB), 2018-2022

Dalam pencapaian kinerja di atas di dukung oleh Program Hubungan Industrial terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 8 (delapan) subkegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp.1.289.495.200,- (satu

milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah).

Sasaran Strategis 3					
Tersedianya Administasi Pelayanan Ketenagakerjaan yang Efektif, Akuntabel, dan Transparan					
No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Existing Tahun 2022	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	86,50	87,00	78,64	90,39
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	70,80	80,00	70,80*	88,50

Keterangan :

* = Realisasi masih menggunakan hasil pengukuran tahun 2022

Capaian target kinerja sasaran ketiga (3) diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja utama adalah sebesar 89,45 persen atau kategori tinggi dengan penjelasan atas capaian masing-masing indikator kinerja utama di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pada tahun 2023, Dinas Ketenagakerjaan menargetkan sebesar 87 persen indeks kepuasan pelayanan administrasi perkantoran. Dari target 87 persen direalisasikan sebesar 78,64% dimana persentase capaiannya sebesar 90,39%.

Pelayanan administrasi perkantoran pada Dinas Ketenagakerjaan di evaluasi secara periodik melalui indeks kepuasan pelayanan administrasi perkantoran. Evaluasi dilakukan dengan memberikan kuesioner atau angket kepada pengguna layanan. Dimana dari 200 angket yang disebar sebanyak 197 orang menyatakan puas. Selanjutnya terdapat 5 indikator yaitu prosedur, waktu pelayanan, prilaku pelaksana pelayanan, maklumant pelayanan dan pengaduan.

Tabel 3.4. Kriteria Nilai Indikator Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran

No.	Persentase (%)	Kriteria Nilai Kepuasan	Kategori Nilai Pelayanan
1	81 - 100	Sangat puas	5
2	61 - 80	Puas	4

3	41 - 60	Cukup/sedang	3
4	21 - 40	Tidak puas	2
5	>20	Sangat tidak puas	1

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik (UU No.25 Tahun 2009). Intinya pelayanan publik merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan pemerintah beserta aparaturnya kepada stakeholder dalam mewujudkan peningkatan kualitas kehidupan stakeholder sekaligus memberikan kepuasan kepada stakeholder yang dilayani.

Dari hasil perhitungan survey menunjukkan nilai indeks pelayanan Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar adalah 3,146. Selanjutnya untuk memudahkan interpretasi hasil indeks tersebut, konversi dilakukan pada nilai indeks diantara 25 - 100, maka hasil penilaian indeks dikonversikan dengan nilai dasar 25 maka hasilnya adalah 78,644.

Tabel 3.5. Hasil Pengolahan Data Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Periode Triwulan I Tahun 2023

NO	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Kinerja Unsur Pelayanan	Bobot	Nilai Indeks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)x(5)
1	Kemudahan Persyaratan Pelayanan	3,09	Baik	0,111	0,343
2	Kemudahan Prosedur Pelayanan	3,08	Baik	0,111	0,342
3	Kecepatan/Ketepatan Waktu Pelayanan	3,06	Kurang Baik	0,111	0,340
4	Kepastian Biaya Pelayanan	3,66	Baik	0,111	0,406
5	Produk Jenis Pelayanan	3,22	Baik	0,111	0,357
6	Kompetensi Pelaksana/ Kemampuan Petugas Pelayanan	3,22	Baik	0,111	0,357
7	Prilaku Pelaksana/ Kesopanan dan Keramahan Petugas Pelayanan	3,25	Baik	0,111	0,361
8	Maklumat Pelayanan	3,11	Baik	0,111	0,345
9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	2,65	Kurang Baik	0,111	0,294
Nilai Indeks					3,146
Nilai IKM					78,644
Mutu Pelayanan					B
Kinerja Unit Pelayanan					Baik

Sebagai salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah kepada stakeholder, sudah tentu suatu pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah harus mencakup seluruh stakeholder yang membutuhkannya. Artinya jangan ada “tebang pilih” dalam pelaksanaannya dan yang paling penting lagi adalah bagaimana stakeholder dapat merasakan kepuasan dari layanan yang diberikan kepada mereka.

Oleh karena itulah, Dinas Ketenagakerjaan dalam pencapaian sasaran tersebut melakukan berbagai strategi ataupun cara untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga pada akhirnya tujuan dari pelaksanaan pelayanan publik itu dapat tercapai dan memberikan tingkat kepuasan kepada stakeholder yang menerimanya meliputi :

1. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur dan keprofesionalan pegawai terkait masalah attitude atau perilaku;
2. Menciptakan kebijakan-kebijakan yang mendukung terselenggaranya peningkatan kualitas pelayanan kepada publik salah satunya dengan Menyusun SOP dan Peta Proses Bisnis;
3. Meningkatkan penyediaan fasilitas yang menunjang kualitas pelayanan publik melalui pengadaan/perbaikakan sarana dan prasarana, penyediaan fasilitas untuk difabel, dan ruang laktasi; serta
4. Penyediaan sarana pengaduan.

Adapun perbaikan secara internal dengan melakukan monitoring dan evaluasi setiap minggu melalui rapat koordinasi untuk membahas program kerja, permasalahan dan solusi pemecahan. Selain itu keterlibatan pimpinan tertinggi secara langsung dalam pelaksanaan setiap kegiatan. Melakukan evaluasi kinerja pegawai setiap triwulannya.



Dalam pencapaian kinerja di atas di dukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota terdiri dari 8 (delapan) kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) subkegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp. 11.549.043.660 ,- (sebelas milyar lima ratus empat puluh sembilan juta empat puluh tiga ribu enam ratus enam puluh rupiah).

2. Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)

Pada tahun 2022, Dinas Ketenagakerjaan menargetkan mendapatkan bobot nilai 80 persen dalam penilaian penerapan SAKIP pada Dinas Ketenagakerjaan dengan realisasi bobot nilai 70,80 BB atau dengan capaian 88,50%.

Tabel 3.6. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

No	Komponen yang Dinilai	Bobot Komponen	Total Nilai AKIP
1	Perencanaan Kinerja	30,00	21,60
2	Pengukuran Kinerja	30,00	20,10
3	Pelaporan Kinerja	15,00	11,10
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	18,00
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100	70,80
Predikat Akuntabilitas Kinerja			BB

Menurunnya penilaian SAKIP disebabkan pada tahun 2022 terdapat perbedaan metode penilaian.

3.2. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Untuk mewujudkan “Ketenagakerjaan yang mandiri, berdaya saing, harmonis dan sejahtera untuk semua”, Dinas Ketenagakerjaan berupaya melaksanakannya dengan program-program pembangunan yang telah direncanakan. Selama tahun 2023, Dinas Ketenagakerjaan telah melaksanakan 5 program dengan 20 kegiatan dan 59 sub kegiatan, dengan alokasi anggaran belanja daerah sebesar Rp.18.274.048.000,- (delapan belas milyar dua ratus tujuh puluh empat juta empat puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp.17.989.080.350,- (tujuh belas milyar sembilan ratus delapan puluh Sembilan juta delapan puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dan belanja modal sebesar Rp. 284.967.650,- (dua ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah).

Realisasi kemajuan belanja Dinas Ketenagakerjaan sebesar Rp.6.015.633.332,- (enam milyar lima belas juta enam ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) atau 32,95 persen.

Serapan anggaran dikaitkan dengan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7 Tingkat Efisiensi Anggaran Dikaitkan dengan Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program Pendukung	Serapan Anggaran (%)	
1	Tersedianya Peluang Kerja yang Didukung oleh Kualitas Tenaga Kerja	1 Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	100,51	1 Program Perencanaan Tenaga Kerja	52,47	
				2 Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	23,29	
		2 Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	96,25	3 Program penempatan Tenaga Kerja	8,00	
		Rata-Rata Capaian Kinerja	98,38	Rata-Rata Capaian Serapan	27,92	
		Efisiensi € = (Capaian Kinerja – Capaian Anggaran)				70,46
		Nilai Efisiensi = $(50 + (E/20 \times 50))$				50,67
		Kategori				Kurang Efisien
2	Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis	1 Angka Sengketa Perusahaan-Pekerja Pertahun	87,20	1 Program Hubungan Industrial	34,53	
		Rata-Rata Capaian Kinerja	87,20	Rata-Rata Capaian Serapan	34,53	
		Efisiensi (E) = (Capaian Kinerja – Capaian Anggaran)				52,57
		Nilai Efisiensi = $(50 + (E/20 \times 50))$				50,05
		Kategori				Kurang Efisien
3	Tersedianya administasi pelayanan ketenagakerjaan yang efektif, akuntabel, dan transparan	1 Indeks Kepuasan Masyarakat	90,39	1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	41,50	
		2 Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	88,50			
		Rata-Rata Capaian Kinerja	89,45	Rata-Rata Capaian Serapan	41,50	
		Efisiensi (E) = (Capaian Kinerja – Capaian Anggaran)				47,95
		Nilai Efisiensi = $(50 + (E/20 \times 50))$				50,04
		Kategori				Kurang Efisien

Adapun rincian belanja dan realisasi anggaran sebagaimana tertuang dalam table berikut:

Tabel 3.8. Realisasi Keuangan Dinas Ketenagakerjaan TA. 2023

No.	Program	Pagu Anggaran	Realisasi Belanja	Capaian
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.656.347.320	4.422.857.738	41,50%
2	Program Perencanaan Tenaga Kerja	155.408.000	81.539.540	52,47%
3	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	4.256.251.500	991.317.585	23,29%
4	Program Penempatan Tenaga Kerja	2.212.970.380	177.012.400	8,00%
5	Program Hubungan Industrial	993.070.800	342.906.069	34,53%
Total		18.274.048.000	6.015.633.332	32,92%

Realisasi kinerja Program-Program tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota terdiri dari 8 (delapan) kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) subkegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp.10.656.347.320,- (sepuluh milyar enam ratus lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp.4.422.857.738,- (empat milyar empat ratus dua puluh dua juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) atau sebesar 41,50 persen
2. Program Perencanaan Tenaga Kerja
Program Perencanaan Tenaga Kerja terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 2 (satu) subkegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp.155.408.000,- (seratus lima puluh lima juta empat ratus delapan ribu rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp.81.539.540,- (delapan puluh satu juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh rupiah) atau sebesar 52,47 persen.
3. Program Pelatihan kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja terdiri dari 5 (lima) kegiatan dan 6 (enam) subkegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp.4.256.251.500,- (empat milyar dua ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp.991.317.585,- (sembilan ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) atau sebesar 23,29 persen.

4. Program Penempatan Tenaga Kerja

Program Penempatan Tenaga Kerja terdiri dari 4 (empat) kegiatan dan 12 (dua belas) subkegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp.2.212.970.380,- (dua milyar dua ratus dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp.177.012.400,- (seratus tujuh puluh tujuh juta dua belas ribu empat ratus rupiah) atau sebesar 8,00 persen.

5. Program Hubungan Industrial

Program Hubungan Industrial terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 8 (delapan) subkegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp. 993.070.800,- (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh puluh ribu delapan ratus rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp.342.906.069,- (tiga ratus empat puluh dua juta sembilan ratus enam ribu enam puluh sembilan rupiah) atau sebesar 34,53 persen.

BAB 4 PENUTUP

Laporan pertanggungjawaban pencapaian kinerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Triwulan II tahun 2023 yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Kerja Tahun 2023 tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini. Secara umum capaian kinerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar sampai dengan triwulan II tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan analisis pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar belum dapat memenuhi sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan Kinerja. Hal ini dapat dilihat dari capaian Indikator Kinerja Utama rata-rata Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar adalah sebagai berikut :
 - a. Sasaran Pertama, “Tersedianya Peluang Kerja yang Didukung oleh Kualitas Tenaga Kerja” rata-rata capaiannya sebesar **98,38%** atau dalam kategori berkinerja sangat tinggi;
 - b. Sasaran Kedua, “Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis” rata-rata capainnya sebesar **87,20%** atau dalam kategori berkinerja tinggi; dan
 - c. Sasaran Ketiga, “Tersedianya Administasi Pelayanan Ketenagakerjaan yang Efektif, Akuntabel, dan Transparan” rata-rata capaiannya sebesar **89,45%** atau dalam kategori berkinerja tinggi.

Untuk meningkatkan kinerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar dan mengatasi kendala-kendala yang dihadapi sampau dengan triwulan I tahun 2023 perlu dilakukan upaya sebagai berikut:

1. Menyusun dan menetapkan indikator kinerja melalui koordinasi internal Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, untuk membahas dan menyepakati indikator kinerja atas program-kegiatan yang dilaksanakan pada bagian-bagian sehingga dapat memperjelas target tujuan yang hendak dicapai dengan ukuran yang tersusun secara sinergis, sistematis dan secara signifikan terarah pada peningkatan capaian kinerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar;
2. Meningkatkan kualitas SDM Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar melalui pelaksanaan pelatihan-pelatihan, pembinaan yang berkelanjutan, serta pemberian kesempatan pendidikan, guna peningkatan kualitas pengetahuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugasnya; dan
3. Peningkatan mutu pelayanan melalui pemberian kesempatan yang lebih luas dalam mengikuti Diklat

Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar sampai dengan triwulan I tahun 2023 melaksanakan 5 (lima) program yang dijabarkan dalam 20 (dua puluh) kegiatan dan 60 (enam puluh) subkegiatan dengan alokasi anggaran belanja daerah sebesar Rp.18.274.048.000,- (delapan belas milyar dua ratus tujuh puluh empat juta empat

puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp.17.989.080.350,- (tujuh belas milyar sembilan ratus delapan puluh Sembilan juta delapan puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dan belanja modal sebesar Rp. 284.967.650,- (dua ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah).

Realisasi kemajuan belanja Dinas Ketenagakerjaan sebesar Rp.6.015.633.332,- (enam milyar lima belas juta enam ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) atau 32,95 persen.



LAMPIRAN



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS KETENAGAKERJAAN

Jl. Andi Pangeran Pettarani No. 72 Telp. / Fax. (0411) 853930 Makassar 90222
Email : disnaker_makassar@gmail.com Homepage : <http://www.makassar.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MAKASSAR
NOMOR : 4132/DISNAKER/560/XII/2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KETENAGAKERJAAN
KOTA MAKASSAR TAHUN 2022-2026

- Menetapkan : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan instansi pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Walikota Makassar Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar Tahun 2022-2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut di atas, maka dipandang perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2022-2026.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);
2. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 5);
4. Peraturan Walikota Makassar Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 55);

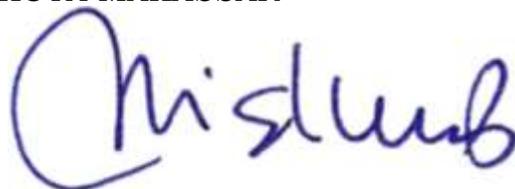
MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MAKASSAR TAHUN 2022-2025;**

- KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan acuan yang digunakan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, dalam menetapkan perencanaan tahunan, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, melakukan pengukuran kinerja, menyusun laporan kinerja dan melaksanakan pengendalian dan evaluasi kinerja, sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2021-2026;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Makassar dan ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2022-2026;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 20 Desember 2021

KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN
KOTA MAKASSAR



NIELMA PALAMBA, SH. M.AP

Pangkat : Pembina Utama Muda/IVc

NIP : 19651210 199112 2 001

LAMPIRAN I
 SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 KETENAGAKERJAAN KOTA MAKASSAR
 NOMOR : 4132/DISNAKER/560/XII/2021
 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
 UTAMA DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA
 MAKASSAR TAHUN 2022-2026

No.	Tujuan/Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD	Sumber Data	Keterangan/Rumus Perhitungan
1	Tersedianya Peluang Kerja yang Didukung oleh Kualitas Tenaga Kerja	Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas	Hasil Sakernas Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia	$RKJ = \frac{\sum \text{Penduduk yang bekerja}}{\sum \text{Penduduk usia + 15 thn}} \times 100\%$
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Hasil Sakernas Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia	$TPTk = \frac{\text{PDRB (harga konstan)}}{\sum \text{Penduduk yang bekerja}} \times 100\%$
2	Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Tahunan	<ul style="list-style-type: none"> • Data Perselisihan Hubungan Industrial Bidang Hubungan Industrial • Data Wajib Lapori Perusahaan 	$\text{Angka Sengketa} = \frac{\sum \text{Kasus perselisihan HI yang dilaporkan}}{\sum \text{Perusahaan di Kota Makassar}} \times 100\%$
3	Tersedianya Administasi Pelayanan Ketenagakerjaan yang Efektif, Akuntabel, dan Transparan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Laporan Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Laporan Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
		Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketenagakerjaan	Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketenagakerjaan oleh Inpektorat Kota Makassar

KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN
 KOTA MAKASSAR

NIELMA PALAMBA, SH. M.AP

Pangkat : Pembina Utama Muda/IVc

NIP : 19651210 199112 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NIELMA PALAMBA, SH., M.AP
Jabatan : KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : MOH. RAMDHAN POMANTO
Jabatan : WALIKOTA MAKASSAR

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Makassar, 31 Januari 2023

PIHAK KEDUA,

MOH. RAMDHAN POMANTO

PIHAK PERTAMA,

NIELMA PALAMBA, SH., M.AP

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MAKASSAR

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersedianya Peluang Kerja yang Didukung oleh Kualitas Tenaga Kerja	Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas	52,00%
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	21,50%
2	Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis	Angka Sengketa Perusahaan-Pekerja Pertahun	4,14%
3	Tersedianya Administasi Pelayanan ketenagakerjaan yang Efektif, Akuntabel, dan Transparan	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,00%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	80,00%

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 10.656.347.320	
2 Program Perencanaan Tenaga Kerja	Rp. 155.408.000	
3 Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 4.256.251.500	
4 Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp. 2.212.970.380	
5 Program Hubungan Industrial	Rp. 993.070.800	

Makassar, 31 Januari 2023

WALIKOTA MAKASSAR



MOH. RAMDHAN POMANTO

KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN



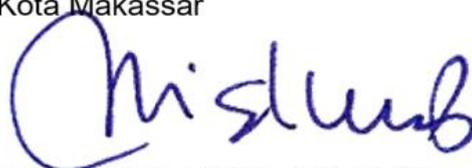
NIELMA PALAMBA, SH., M.AP

Lampiran 3

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2023**

NO.	SASARAN			
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Tersedianya Peluang Kerja yang Didukung oleh Kualitas Tenaga Kerja	- Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	Persen	52,00
		- Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Persen	21,50
2.	Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis	- Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja pertahun	Persen	4,14
3	Tersedianya Administasi Pelayanan Ketenagakerjaan yang Efektif, Akuntabel, dan	- Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	87,00
		- Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	Persen	80,00

Makassar, Juni 2023
Kepala Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar



NIELMA PALAMBA, SH. M.AP

Pangkat : Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. : 19651210 199112 2 006

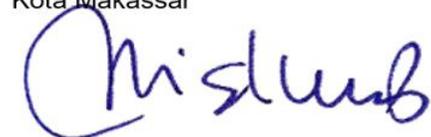
Lampiran 4

**PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN
DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MAKASSAR
TAHUN 2023**

NO.	SASARAN						KETERANGAN
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1.	Tersedianya Peluang Kerja yang Didukung oleh Kualitas Tenaga Kerja	- Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	%	52,00	52,26	100,51	
		- Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	21,50	20,69	96,25	
		Rata-rata capaian				98,38	
2.	Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis	- Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja pertahun	%	4,14	4,67	87,20	Indikator bermakna negatif
		Rata-rata capaian				87,20	
3	Tersedianya Administasi Pelayanan Ketenagakerjaan yang Efektif, Akuntabel, dan Transparan	- Indeks Kepuasan Masyarakat	%	87,00	78,64	90,39	
		- Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)		80,00	70,80	88,50	
		Rata-rata capaian				89,45	
PERSENTASE CAPAIAN TARGET						92,23	

Makassar, Juni 2023

Kepala Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar



NIELMA PALAMBA, SH. M.AP

Pangkat : Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. : 19651210 199112 2 006

Lampiran 5

**EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MAKASSAR
PERIODE PELAKSANAAN : SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023**

Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Kota Makassar yang Mengacu pada sasaran RKP

- 52,00 Persen Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas;
- 21,50 Persen Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja;
- 4,14 Persen Angka Sengketa Perusahaan-Pekerja Pertahun
- 87,00 Persen Indeks Kepuasan Masyarakat;
- 80,00 Persen Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP).

1.524.201.34

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran DPA Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
			4		5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 11/6 x 100%			14 = 5 + 11		15 = 13/4 x 100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	
URUSAN WAJIB																												
02	2.07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA		100.978.427.000	17.696.143.073	16.399.301.944	18.274.048.000	2.203.632.417	3.812.000.915	-	-	-	-	32,92%	6.015.633.332	32,92	23.711.776.405	23,48					DISNAKER				
02	2.07	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE SARANA DAN PRASARANA APARATUR DALAM KONDISI BAIK	90 PERSEN	66.549.824.200	90,41	9.964.018.995	90	10.333.799.664	90	10.656.347.320	13,02	1.529.916.148	37,88	2.892.941.590	37,88	4.422.857.738	42,09	41,50	38	14.386.876.733	42,09	21,62	DISNAKER			
				PERSENTASE KETERSEDIAAN LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	100 PERSEN		100,00		100		100	25,00		50,00			50,00		50,00		50		50,00					
				PERSENTASE ASN PERANGKAT DAERAH YANG MENDAPAT PENINGKATAN KAPASITAS	90 PERSEN		68,25		90		90	17,94		55,74			55,74		61,93		56		61,93					
02	2.07	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	67 Dokumen	1.558.610.628	13	182.407.750	13	272.589.000	13	248.640.000	0	40.000.000	1	19.000.000	0	59.000.000	7,69	23,73	14	241.407.750	20,90	15,49	Disnaker		
02	2.07	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	791.358.540	2	57.827.650	2	130.295.000	2	133.736.000	0	40.000.000	1	19.000.000	1	59.000.000	50	44,12	3	116.827.650	25,00	14,76	Disnaker	
02	2.07	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	49.643.596	1	7.510.000	1	9.651.000	1	2.176.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7.510.000	20,00	15,13	Disnaker	
02	2.07	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	46.569.705	1	8.575.000	1	8.984.000	1	2.176.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8.575.000	20,00	18,41	Disnaker	
02	2.07	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	44.890.114	1	6.808.000	1	9.764.000	1	2.636.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6.808.000	20,00	15,17	Disnaker	
02	2.07	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	42.013.201	1	6.560.000	1	8.788.000	1	1.724.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6.560.000	20,00	15,61	Disnaker	
02	2.07	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25 Dokumen	541.904.462	5	89.084.500	5	97.785.000	5	106.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5	89.084.500	20,00	16,44	Disnaker	
02	2.07	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen	42.231.009	2	6.042.600	2	7.322.000	2	192.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6.042.600	20,00	14,31	Disnaker	
02	2.07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	240 Dokumen	45.333.869.754	48	6.579.946.435	36	7.275.827.940	36	7.275.828.906	9	1.171.707.769	9	2.186.459.819	-	18	3.358.167.588	50,00	46,16	66	9.938.114.023	27,50	21,92	Disnaker
02	2.07	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	305 Orang/Bulan	43.046.749.849	61	6.167.814.035	61	6.891.107.940	61	6.891.108.906	0	1.076.427.769	61	2.091.179.819		61	3.167.607.588	100,00	45,97	122	9.335.421.623	40,00	21,69	Disnaker
02	2.07	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60 Dokumen	1.337.997.801	12	229.360.000	12	240.720.000	12	240.720.000	3	59.280.000	3	59.280.000		6	118.560.000	50,00	49,25	18	347.920.000	30,00	26,00	Disnaker
02	2.07	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Dokumen	746.442.288	12	144.000.000	12	144.000.000	12	144.000.000	3	36.000.000	3	36.000.000		6	72.000.000	50,00	50,00	18	216.000.000	30,00	28,94	Disnaker
02	2.07	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	60 Laporan	202.679.816	12	38.772.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	12	38.772.400	20,00	19,13	Disnaker	
02	2.07	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi BMD pada Perangkat Daerah	60 Dokumen	735.931.340	12	124.111.680	12	143.673.200	12	143.673.200	3	28.672.200	3	28.500.000	-	6	57.172.200	50,00	39,79	18	181.283.880	30,00	24,63	Disnaker
02	2.07	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	60 Dokumen	424.788.769	12	63.616.752	12	83.440.800	12	83.440.800	3	15.058.800	3	15.000.000		6	30.058.800	50,00	36,02	18	93.675.552	30,00	22,05	Disnaker
02	2.07	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	60 Laporan	311.142.572	12	60.494.928	12	60.232.400	12	60.232.400	3	13.613.400	3	13.500.000		6	27.113.400	50,00	45,01	18	87.608.328	30,00	28,16	Disnaker
02	2.07	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60 Dokumen	1.644.290.162	12	142.252.428	12	204.488.400	12	224.138.400	3	30.873.640	3	45.517.994	-	6	76.391.634	50,00	34,08	18	218.644.062	30,00	13,30	Disnaker
02	2.07	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	548 Paket	427.458.285	108	63.070.000	110	75.000.000	110	88.650.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	108	63.070.000	19,71	14,75	Disnaker
02	2.07	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	60 Dokumen	312.695.296	12	60.550.428	12	60.488.400	12	60.488.400	3	13.613.400	3	13.500.000		6	27.113.400	50,00	44,82	18	87.663.828	30,00	28,03	Disnaker
02	2.07	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	69 Orang	780.000.000	2	18.632.000	7	69.000.000	10	75.000.000	2	17.260.240	3	32.017.994		5	49.278.234	50,00	65,70	7	67.910.234	10,14	8,71	Disnaker
02	2.07	01	2.05	10	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	200 Orang	124.136.580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	Disnaker	
02	2.07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Jasa Administrasi Umum yang Tersedia	35 Jenis	5.775.451.212	7	702.242.712	7	998.941.840	7	1.013.832.780	1	130.690.196	2	259.386.805	-	3	390.077.001	42,86	38,48	10	1.092.319.713	28,57	18,91	Disnaker
02	2.07	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	63.252.683	1	10.415.000	1	10.560.100	1	12.687.100	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1	10.415.000	20,00	16,47	Disnaker	
02	2.07	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket	432.256.379	4	68.242.000	4	68.812.200	5	78.695.300	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	4	68.242.000	16,00	15,79	Disnaker
02	2.07	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	391.899.942	2	67.138.100	2	56.204.540	3	77.430.380	1	4.875.000	1	11.290.350		2	16.165.350	66,67	20,88	4	83.303.450	26,67	21,26	Disnaker
02	2.07	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	186.007.458	2	22.330.000	1	19.465.000	2	39.620.000	0	0	1	15.850.000		1	15.850.000	50,00	40,01	3	38.180.000	30,00	20,53	Disnaker
02	2.07	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	60 Dokumen	100.473.750	12	16.320.000	12	19.500.000	12	19.500.000	3	2.880.000	3	4.080.000		6	6.960.000	50,00	35,69	18	23.280.000	30,00	23,17	Disnaker
02	2.07	01	2.06	09	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	2.956.315.000	12	469.397.612	66	420.000.000	32	331.500.000	12	111.835.196	6	72.266.455		18	184.101.651	56,25	55,54	30	653.499.263	50,00	22,11	Disnaker
02	2.07	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	60 Dokumen	1.645.246.000	12	48.400.000	12	404.400.000	12	454.400.000	3	11.100.000	3	155.900.000		6	167.000.000	50,00	36,75	18	215.400.000	30,00	13,09	Disnaker
02	2.07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	358 Unit	4.085.244.492	120	1.398.284.901	33	216.466.750	56	274.199.750	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	120	1.398.284.901	33,52	34,23	Disnaker
02	2.07	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	150 Unit	1.270.400.000	49	457.774.591	3	30.000.000	19	78.872.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	49	457.774.591	32,67	36,03	Disnaker
02	2.07	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	200 Unit	2.214.844.492	69	848.941.750	30	186.466.750	37	195.327.750	0	0	0	0	0	0	0	0,00						

02	2.07	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	1.352.183.660	12	28.122.000	12	139.255.500	12	309.255.500	3	6.750.000	3	46.750.000					6	53.500.000	50,00	17,30	18	81.622.000	30,00	6,04	Disnaker			
02	2.07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	243 Unit	3.412.124.190	46	380.787.080	63	573.756.750	63	657.254.500	3	37.849.500	7	218.786.600	-	-	-	-	10	256.636.100	15,87	39,05	56	637.423.180	23,05	18,68	Disnaker			
02	2.07	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	249.299.292	1	32.024.600	1	40.759.200	1	50.398.850	0	6.394.500	1	5.880.700					1	12.275.200	100,00	24,36	2	44.299.800	40,00	17,77	Disnaker			
02	2.07	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	80 Unit	1.724.233.340	15	126.690.150	15	306.757.550	15	370.615.650	3	31.455.000	5	30.377.800					8	61.832.800	53,33	16,68	23	188.522.950	28,75	10,93	Disnaker			
02	2.07	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	150 Unit	237.669.540	29	34.423.100	46	36.050.000	46	46.050.000	0	0	0	0					0	0	0,00	0,00	29	34.423.100	19,33	14,48	Disnaker			
02	2.07	01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	3 Unit	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	Disnaker		
02	2.07	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	5 Unit	1.050.922.019	1	187.649.230	1	190.190.000	1	190.190.000	0	0	1	182.528.100					1	182.528.100	100,00	95,97	2	370.177.330	40,00	35,22	Disnaker			
																							Rata-Rata Capaian Kinerja (%)			51,34	41,50			51,34	21,62	Disnaker		
																							Predikat Kinerja			Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	Disnaker		
02	2.07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	PERSENTASE KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN YANG MENGACU KE RENCANA TENAGA KERJA	96,77 PERSEN	636.233.000	93,33	224.904.165	93,55	231.508.000	93,55	155.408.000	0,00	57.000.000	46,00	24.539.540	0,00	0	-	46,00	81.539.540	49,17	52,47	46,00	306.443.705	47,54	48,17	DISNAKER				
02	2.07	02	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK)	5 Dokumen	636.233.000	1	224.904.165	1	231.508.000	1	155.408.000	0	57.000.000	0	24.539.540	0	0	0	0	81.539.540	0,00	52,47	1	306.443.705	20,00	48,17	Disnaker				
02	2.07	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	5 Dokumen	471.897.366	1	125.714.965	1	156.666.000	1	88.666.000	0	0	0	21.494.540				0	21.494.540	0,00	24,24	1	147.209.505	20,00	31,20	Disnaker				
02	2.07	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	500 Perusahaan	164.335.634	150	99.189.200	50	74.842.000	50	66.742.000	50	57.000.000	0	3.045.000					50	60.045.000	100,00	89,97	200	159.234.200	40,00	96,90	Disnaker			
																							Rata-Rata Capaian Kinerja (%)			49,17	52,47			47,54	48,17	Disnaker		
																							Predikat Kinerja			Sangat Rendah	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	Disnaker		
02	2.07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	PERSENTASE TENAGA KERJA BERSERTIFIKAT KOMPETENSI	1,20 PERSEN	20.134.599.650	0,53	3.307.805.025	0,70	3.508.303.100	0,70	4.256.251.500	0,00	469.815.900	0,59	521.501.685			-	0,59	991.317.585	83,72	23,29	0,59	4.299.122.610	48,84	21,35	DISNAKER				
							TINGKAT PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		23,00 PERSEN	20,05	21,50	21,50	0,00	20,05																				
							JUMLAH PESERTA PELATIHAN SKIL TRANING GRATIS SEKTOR KETENAGAKERJAAN		5.690 ORANG	1.122	1.000	1.000	75,00	170,00																				
02	2.07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun 2023	2.800 Orang	11.068.673.234	532	1.362.066.799	676	2.336.805.500	564	2.556.527.500	0	54.100.000	0	41.811.685	-	-	-	-	0	95.911.685	0,00	3,75	532	1.457.978.484	19,00	13,17	Disnaker			
02	2.07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun 2023	2.800 Orang	10.123.339.130	532	1.194.177.349	676	2.300.590.000	564	2.520.312.000	0	38.300.000	0	36.861.685					-	75.161.685	0,00	2,98	532	1.269.339.034	19,00	12,54	Disnaker			
02	2.07	03	2.01	02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun 2023	750 Lembaga	945.334.104	180	167.889.450	50	36.215.500	50	36.215.500	50	15.800.000	0	4.950.000					50	20.750.000	100,00	57,30	230	188.639.450	30,67	19,95	Disnaker			
02	2.07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	400 Lembaga	492.061.325	80	111.718.792	80	151.996.000	60	132.796.000	60	112.500.000	0	3.808.000	-	-	-	-	60	116.308.000	100,00	87,58	140	228.026.792	35,00	46,34	Disnaker			
02	2.07	03	2.02	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	400 Lembaga	492.061.325	80	111.718.792	80	151.996.000	60	132.796.000	60	112.500.000	0	3.808.000					60	116.308.000	100,00	87,58	140	228.026.792	35,00	46,34	Disnaker			
02	2.07	03	2.03		Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	120 Perizinan	1.265.515.343	-	142.671.834	24	183.000.400	24	192.600.400	3	38.302.400	7	39.000.000	-	-	-	-	10	77.302.400	41,67	40,14	10	219.974.234	8,33	17,38	Disnaker			
02	2.07	03	2.03	01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	120 Perizinan	1.265.515.343	-	142.671.834	24	183.000.400	24	192.600.400	3	38.302.400	7	39.000.000					10	77.302.400	41,67	40,14	10	219.974.234	8,33	17,38	Disnaker			
02	2.07	03	2.04		Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	1.250 Perusahaan	2.207.533.361	250	451.065.800	200	609.156.000	320	541.556.000	75	105.378.000	150	205.692.500	-	-	-	-	225	311.070.500	70,31	57,44	475	762.136.300	38,00	34,52	Disnaker			
02	2.07	03	2.04	01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	1.250 Perusahaan	2.207.533.361	250	451.065.800	200	609.156.000	320	541.556.000	75	105.378.000	150	205.692.500					225	311.070.500	70,31	57,44	475	762.136.300	38,00	34,52	Disnaker			
02	2.07	03	2.05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	5 Dokumen	5.100.816.387	1	1.240.281.800	1	227.345.200	1	832.771.600	0	159.535.500	0	231.189.500	-	-	-	-	0	390.725.000	0,00	46,92	1	1.631.006.800	20,00	31,98	Disnaker			
02	2.07	03	2.05	01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	5 Dokumen	5.100.816.387	1	1.240.281.800	1	227.345.200	1	832.771.600	0	159.535.500	0	231.189.500					0	390.725.000	0,00	46,92	1	1.631.006.800	20,00	31,98	Disnaker			
																							Rata-Rata Capaian Kinerja (%)			67,16	23,29			53,34	21,35	Disnaker		
																							Predikat Kinerja			Sedang	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	Disnaker		
02	2.07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	PERSENTASE TENAGA KERJA YANG DITEMPATKAN MELALUI MEKANISME LAYANAN ANTAR KERJA DALAM WILAYAH KOTA MAKASSAR	75,00 PERSEN	9.042.923.150	53,46	3.050.042.646	60,00	1.257.346.780	60,00	2.212.970.380	20,64	39.806.400	42,68	137.206.000			-	42,68	177.012.400	71,13	8,00	42,68	3.227.055.046	56,90	35,69	DISNAKER				
							JUMLAH PELUANG KERJA DAN PELUANG BISNIS BARU		46.240 PELUANG KERJA	8.483	8.640	8.640	1.304	1.600																				
02	2.07	04	2.01		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan, Diberdayakan dan Fasilitas Layanan	15.915 Orang	4.658.055.590	3.864	1.985.005.722	3.380	621.125.080	3.909	1.591.348.680	364	12.579.600	431	110.206.000	-	-	-	-	795,00	122.785.600	20,34	7,72	4.659	2.107.791.322	29,27	45,25	Disnaker			
02	2.07	04	2.01	01	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	120 Orang	140.000.000	0	0	33	47.127.000	30	30.011.000	0	0	0	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Disnaker
02	2.07	04	2.01	02	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	14.000 Orang	1.581.271.686	3.400	646.716.626	3.000	82.877.500	3.500	96.077.500	364	12.579.600	411	14.544.000					775,00	27.123.600	22,14	28,23	4175	673.840.226	29,82	42,61	Disnaker			
02	2.07	04	2.01	03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	500 Orang	211.723.027	100	40.762.940	100	25.269.000	100	25.269.000	0	0	0	0					0,00	0	0,00	0,00	100	40.762.940	20,00	19,25	Disnaker			
02	2.07	04	2.01	04	Penyenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	500 Orang	579.577.120	115	142.566.676	100	69.828.200	100	69.828.200	0	0	0	10.000.000					0,00	10.000.000	0,00	14,32	115	152.566.676	23,00	26,32	Disnaker			
02	2.07	04	2.01	05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	915 Orang	2.145.483.756	249	1.154.959.480	180	396.023.380	209	1.370.162.980	0	20	85.662.000					20,00	85.662.000	9,57	6,25	269	1.240.621.480	29,40	57,82	Disnaker				
02	2.07	04	2.02		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi	30 Lembaga	310.550.466	6	56.786.096	6	84.638.600	6	70.038.600	0	9.075.600	2	9.000.000	-	-	-	-	2	18.075.600	33,33	25,81	8	74.861.696	26,67	24,11	Disnaker			
02	2.07	04	2.02	01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi	30 Lembaga	227.504.964	6	42.422.888	6	42.453.600	6	42.453.600	0	9.075.600	2	9.000.000					2	18.075.600	33,33	42,58	8	60.498.488	26,67	26,59	Disnaker			
02	2.07	04	2.02	02	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	20 Lembaga	83.045.502	4	14.363.208	4	42.185.000	4	27.585.000	0	0	0	0					-	0,00	0,00	4	14.363.208	20,00	17,30	Disnaker				
02	2.07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	40.000 Orang	3.031.203.308	7.361	870.380.604	4.000	453.906.200	4.000	453.906.200	865	18.151.200	999	18.000.000	-	-	-	-	1864,00	36.151.200	46,60	7,96	9.225	906.531.804	23,06	29,91	Disnaker			
02	2.07	04	2.03	01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	60 Dokumen	316.496.699	12	47.681.252	12	42.767.600	12	42.767.600	3	9.075.600	0	9.000.000					3,00	18.075.600	25,00	42,26	15	65.756.852	25,00	20,78	Disnaker			
02	2.07	04	2.03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	40.000 Orang	1.000.699.896	7.361	217.646.552	4.000	46.109.600	4																					

02	2.07	04	2.04	03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	400 Orang	483.143.304	40	100.087.284	20	72.366.900	20	72.366.900	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	40	100.087.284	10,00	20,72	Disnaker																						
																					Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		52,37	8,00																				31,59	35,69	Disnaker			
																					Predikat Kinerja		Rendah	Sangat Rendah																					Sangat Rendah	Sangat Rendah	Disnaker		
02	2.07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	PERSENTASE PERUSAHAAN YANG MENERAPKAN TATA KELOLA KERJA YANG LAYAK	51,01 PERSEN	4.614.847.000	28,62	1.149.372.242	33,69	1.068.344.400	33,69	993.070.800	0,00	107.093.969	28,62	235.812.100	-	-	-	28,62	342.906.069	84,94	34,53	33,69	1.492.278.311	66,05	32,34	DISNAKER																			
							ANGKA SENGKETA PERUSAHAAN-PEKERJA PERTAHUN	2,50 PERSEN		4,67		4,14		0,00		4,67					4,67			87,31		4,14		34,40																					
							PERSENTASE KASUS YANG DISELESAIKAN DENGAN PERJANJIAN BERSAMA (PB)	89,00 PERSEN		61,38		74,00		74,00		35,29		62,96					62,96		85,09		62,96		70,74																				
02	2.07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama	525 Perusahaan	1.332.331.879	113	552.792.620	105	43.695.700	105	50.622.100	-	891.569	-	2.072.100	-	-	-	-	2.963.669	0,00	5,85	113	555.756.289	21,52	41,71	Disnaker																			
02	2.07	05	2.01	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	500 Perusahaan	283.221.159	109	54.853.000	100	1.708.000	100	1.708.000	0	0	0					-	-	0,00	0,00	109	54.853.000	21,80	19,37	Disnaker																			
02	2.07	05	2.01	02	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	25 Perusahaan	133.896.405	4	52.380.400	5	1.280.000	5	1.280.000	0	0	0					-	-	0,00	0,00	4	52.380.400	16,00	39,12	Disnaker																			
02	2.07	05	2.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	60 Laporan	915.214.315	12	445.559.220	12	40.707.700	12	47.634.100	3	891.569		2.072.100			3	2.963.669	25,00	6,22	15	448.522.889	25,00	49,01	Disnaker																				
02	2.07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	1.250 Perkara	3.282.515.121	249	596.579.622	260	1.024.648.700	260	942.448.700	-	106.202.400	-	233.740.000	-	-	-	-	339.942.400	0,00	36,07	249	936.522.022	19,92	28,53	Disnaker																			
02	2.07	05	2.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	250 Perkara	622.236.026	52	180.230.800	60	127.582.000	60	104.582.000	0	0	0	93.100.000				-	93.100.000	0,00	89,02	52	273.330.800	20,80	43,93	Disnaker																			
02	2.07	05	2.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselamatkan	1.000 Perkara	1.087.010.870	197	133.957.052	200	174.318.400	200	174.318.400		36.302.400		36.000.000				-	72.302.400	0,00	41,48	197	206.259.452	19,70	18,97	Disnaker																			
02	2.07	05	2.02	03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	60 Asosiasi dan Serikat Pekerja	166.410.909		28.538.700	12	21.966.000	12	16.766.000	3	0	0	0			3	-	25,00	0,00	3	28.538.700	5,00	17,15	Disnaker																				
02	2.07	05	2.02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	60 Lembaga	1.071.824.265	3	188.873.170	2	336.630.800	2	300.630.800		33.300.000		26.490.000			-	-	59.790.000	0,00	19,89	3	248.663.170	5,00	23,20	Disnaker																			
02	2.07	05	2.02	05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	375 Orang	335.033.052	150	64.979.900	100	364.151.500	100	346.151.500		36.600.000		78.150.000			-	-	114.750.000	0,00	33,15	150	179.729.900	40,00	53,65	Disnaker																			
																					Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		85,78	34,53																						57,06	32,34	Disnaker	
																					Predikat Kinerja		Tinggi	Sangat Rendah																						Sangat Rendah	Sangat Rendah	Disnaker	
																					TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ...)		61,16	32,92																							48,17	23,48	Disnaker
																					PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ...)		Sedang	Sangat Rendah																							Sangat Rendah	Sangat Rendah	Disnaker

Disusun
Makassar, Juni 2023
KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN
KOTA MAKASSAR
Nielma Palamba
NIELMA PALAMBA, SH., M.AP
NIP : 19651210 199112 2 001

Dievaluasi
Makassar, Juni 2023
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA MAKASSAR

HELMY BUDIMAN, S.STP, MM
Nip. 19840513 200212 1 002